

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949-1950

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Leonardo

Nim : 011314043

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

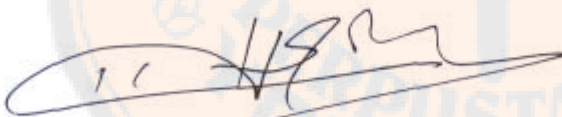
SKRIPSI

**PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949-1950**

**OLEH
LEONARDO
NIM : 011314043**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal 21-05-2007

Pembimbing II



Drs. B. Musidi, M.Pd.

Tanggal 21-05-2007

SKRIPSI

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949-1950

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

LEONARDO

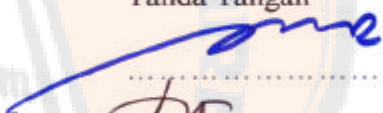
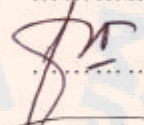
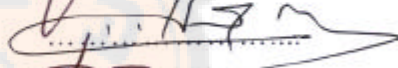
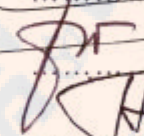
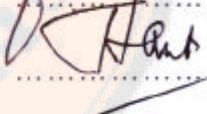
NIM : 011314043

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 31 Juli 2007

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R, S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	

Yogyakarta, 31 Juli 2007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas dasar cinta, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Tuhanku penguasa alam semesta yang dengan setia selalu menjaga dan mendampingi setiap langkah dalam hidupku.
- Papa dan ibu tercinta, terimakasih atas pengorbanan, perjuangan, kepercayaan, dan kasih sayangnya.
- Mama yang ada di surga yang telah memberikan nafas kehidupan.
- Kedua Adikku tersayang, Riko dan Berto yang telah menjadi aspirasi putih dalam mencapai tujuanku.
- Seluruh keluarga Besarku yang bukan rahasia lagi selalu mendoakanku.
- Separuh nafasku Lina Ndu' Ku Dwiyanti, terimakasih telah menemaniku dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kamulah satu-satunya.
- Laskar Cinta 291 dan Ex 291, tebarkanlah benih-benih cinta dan musnahkanlah virus-virus benci.
- Keluarga besar 291 (Pak Parno, Ibu Yayuk), terimakasih atas semuanya.
- Sedulur-sedulur angkatan '01 Ovie, Siska, Jonni Van Ann, Maria, Era, Ida Bolon, Lippo, Mas dab Suryatno, dan yang tak bisa di sebut satu persatu.
- Almamaterku tercinta Prodi pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma .

HALAMAN MOTO

**"Bukan karena segalanya sulit sehingga kita tidak berani,
tetapi karena kita tidak berani maka segalanya sulit"
(Seneca)**

**"Bukan tingginya tingkat kecerdasan atau daya cipta atau keduanya
yang menciptakan seseorang jenius, tetapi cinta, cinta, dan
cintalah yang melahirkan orang berjiwa jenius"
(Wolfgang Amadeus Mozart)**

**"Perjalanan sejauh seribu mil berawal dari sebuah langkah kecil"
(Lao Tze)**

**"Seorang guru yang coba mempelajari tanpa menghidupkan dan
menimbulkan keinginan dan semangat belajar pada muridnya sama
saja dengan orang yang menempa besi yang dingin"
(Horace Mann)**

**"Buatlah dirimu menjadi berkah bagi seseorang, Senyummu yang
tulus dan tepukan di bahu mungkin bisa menarik seseorang dari tepi
jurang"
(Camelei Elliot)**

**"Cintai apa yang kamu kerjakan, jangan hanya mengerjakan apa
yang kamu cintai"
(Aristoteles)**

**Cintailah Cinta
(Ahmad Dhani)**

**"Lihatlah orang lain dengan sebelah matamu dan lihatlah dirimu
dengan kedua belah matamu, yakinlah kalau kamu bisa lebih dari
mereka"
(Penulis)**

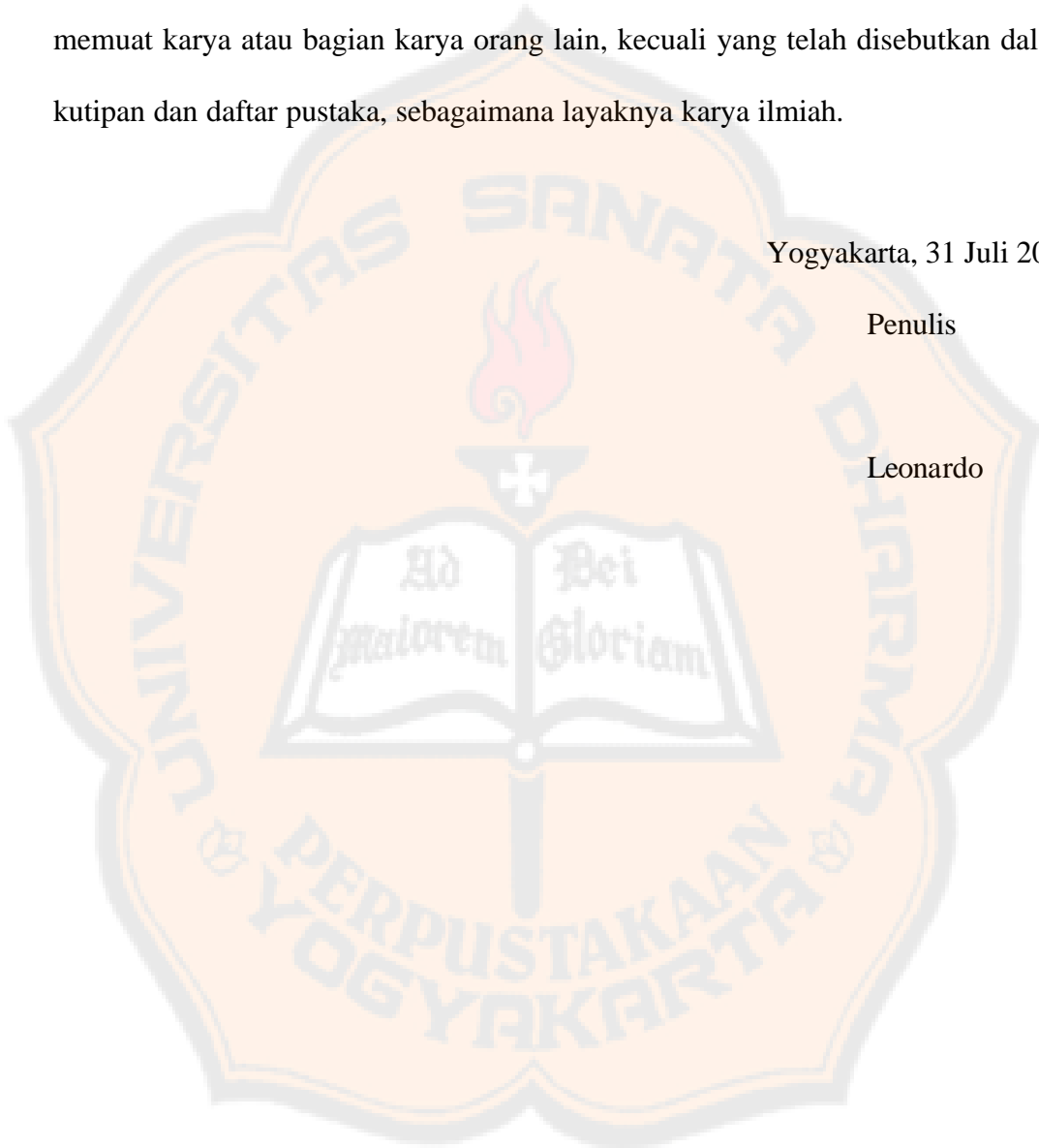
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Juli 2007

Penulis

Leonardo



ABSTRAK

**PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949-1950**

**Oleh :Leonardo
011314043**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa: (1) Proses pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, (2) Jalannya Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pengakuan Kedaulatan kepada RIS, (3) Dampak Politik dan Militer terhadap RIS serta Pembubaran RIS.

Metode yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah metode *historis*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, sosial, dan militer. Pengkajian dalam penulisan skripsi ini secara diskriptif naratif.

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa : (1) Proses pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilakukan dengan dua cara, melalui perundingan dengan pihak Belanda dan melalui intervensi dunia internasional dengan dikeluarkannya resolusi oleh DK-PBB (Dewan Keamanan-Perserikatan Bangsa-Bangsa), (2) Karena Belanda sering mengeluarkan tuntutan yang menyudutkan Republik Indonesia, maka KMB berjalan lamban. Dengan bantuan *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI), KMB dapat diselesaikan. (3) Karena muncul pemberontakan-pemberontakan setelah RIS terbentuk, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan.

ABSTRACT

**THE ESTABLISHMENT AND THE DISMISS
OF THE UNITED REPUBLIC OF INDONESIA
1949-1950.**

By : Leonardo

This thesis was conducted to describe and to analyze: (1) the returning process of Indonesian Government to Yogyakarta, (2) the process of Round-Table Conference and the sovereign recognition of the United Republic of Indonesia, (3) the political and military impacts of the United Republic of Indonesia and its dismissal.

The method employed in this library research was historical method and the approaches employed in this research were political, historical, and military approaches. This thesis was presented in narrative-descriptive way.

The result of the library research were (1) the returning process of Indonesian Government to Yogyakarta was performed in two ways through the agreement with the Dutch and by international intervention with the resolution issued by Security Board of the United Nations, (2) given the fact that the Dutch often imposed the excessive demand to Republic Indonesia, the conference moved slowly. With the help from The United Nation Commission for Indonesia (UNCI), the Round Table Conference was finally completed, (3) due to the upheavals after the establishment of the United Republic of Indonesia, it was officially dismissed on August 15th, 1950.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan kasihnya, sehingga penulisan skripsi berjudul “Pembentukan dan Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat 1949-1950” ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan studi pustaka dengan menyetujui judul yang penulis ajukan.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H, selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd., selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, serta memberi banyak saran dan masukan dengan canda tawanya.
6. Bapak Drs. Y.R. Subakti, M.Pd., selaku dosen pembimbing akademik, yang
7. telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
8. Ibu Dra. Th. Sumini, M.Pd., dengan jiwa keibuannya telah memberikan motivasi bagi penulis dan selalu mengingatkan penulis akan tujuan hidup ini.
9. Semua Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan dosen lainnya yang telah membuka cakrawala ilmu bagi penulis,
10. Pihak Sekretariat Pendidikan Sejarah (Mas Sidik) yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis, khususnya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
11. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam mendapatkan referensi untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah, khususnya angkatan 2001, serta semua sahabat dan kenalan; atas dukungannya, persahabatan, kerjasama, dan kebersamaannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
13. Teman-teman KKN angkatan XXXI Dusun Glodogan (Abas, Danang, Gusti, Dianing, Eli, Dewi, Don-Don, Tubruk, Lia). Matur nuwun atas persaudaraannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14. Cinta, bahagia, tawa, kesedihan, tangisan yang pernah melintas dikampus Universitas Sanata Dharma tercinta selama penulis menempuh studi.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya dari penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2007

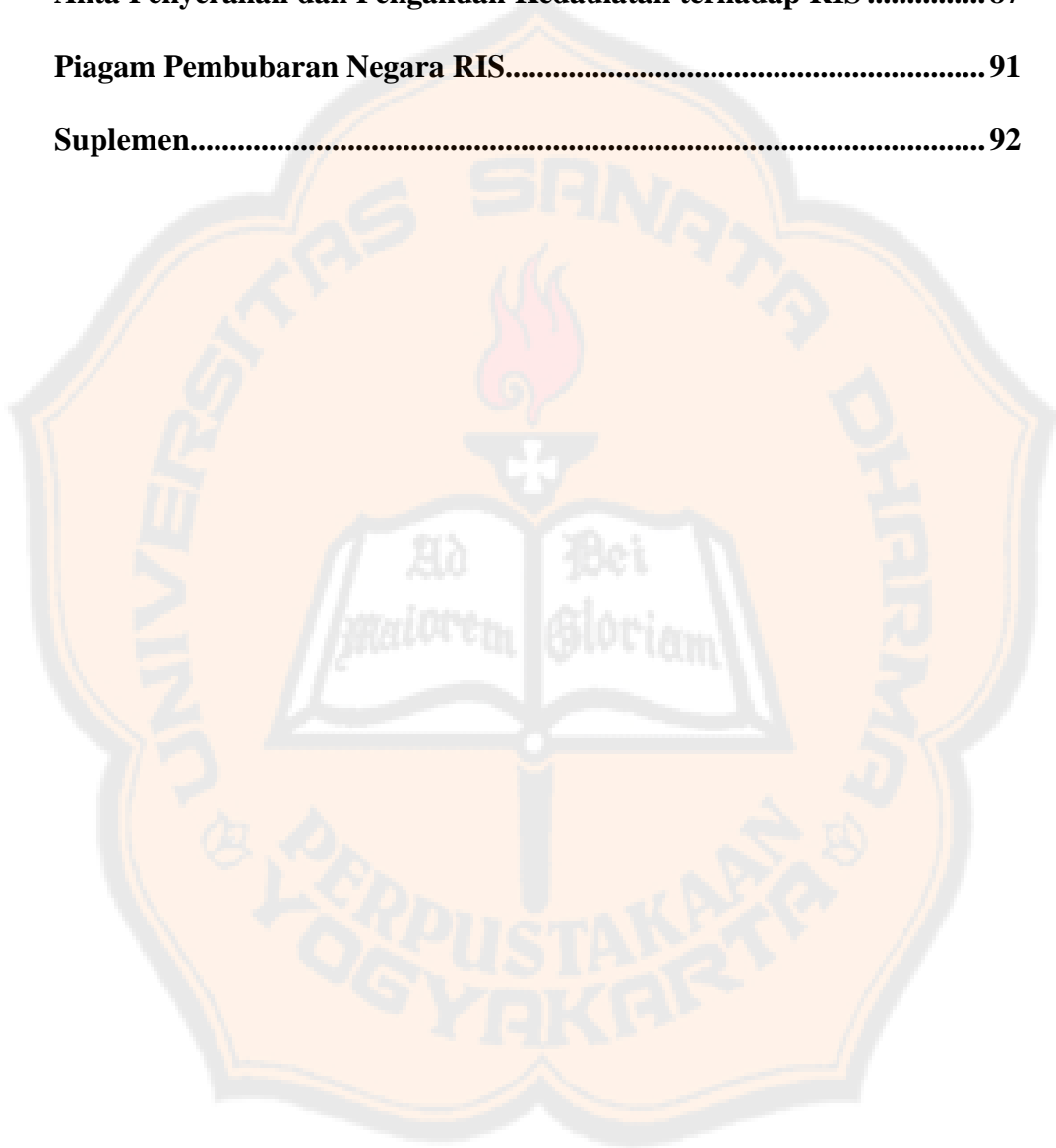
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Landasan Teori.....	18
F. Hipotesis	20
G. Metode dan Pendekatan	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. PENGEMBALIAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE YOGYAKARTA	
A. Pelaksanaan Perjanjian Renville	24
B. Agresi Militer Belanda II	31
C. Indonesia – Belanda – BFO	38
BAB III. JALANNYA PERUNDINGAN DALAM KMB DAN PENGAKUAN KEDAULATAN TERHADAP RIS	
A. Jalannya Perundingan Dalam KMB	46
B. Pengakuan Kedaulatan Terhadap RIS.....	56
BAB IV. DAMPAK POLITIK DAN MILITER TERHADAP RIS SETELAH PENGAKUAN KEDAULATAN	
A. Dampak Politik dan Militer Terhadap RIS	60
B. Pembubaran Negara RIS	70
BAB V. KESIMPULAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
GLOSARRY	85
LAMPIRAN	86

DAFTAR LAMPIRAN

Peta Negara RIS	86
Akta Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan terhadap RIS	87
Piagam Pembubaran Negara RIS.....	91
Suplemen.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi nasional Indonesia timbul karena perasaan tidak aman dan penuh kegelisahan yang menyangkut soal kelangsungan hidup bangsa Indonesia.¹ Revolusi itu berhasil menumbangkan pemerintahan lama yang kemudian diganti dengan pemerintahan baru. Penumbangan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Sukarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan proklamasi itu maka Pemerintah Jepang segera diganti dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Pernyataan proklamasi yang diumumkan ke seluruh dunia menjadikan bangsa Indonesia berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka di dunia.²

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan RI tidak berarti bahwa perjuangan bangsa Indonesia menghadapi bangsa asing itu sudah selesai, perjuangan masih terus dilakukan yaitu menghadapi pemerintah Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi seperti yang pernah dilakukan sebelum kedatangan Jepang di Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, ia harus melepaskan kembali daerah pendudukannya. Ini berarti daerah kolonial yang semula direbut dari bangsa Barat yang tergabung

¹ Sartono Kartodirjo, 1970: *“Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sedjarah Indonesia”* dalam Lembaran Sedjarah No. 6. FSK-UGM, Yogyakarta, hlm. 12.

² Muhammad Ridhwan Indra dan Sophian Marthabaya, 1987: *Peristiwa-Peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-08-1945*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 1.

ke dalam Blok Sekutu harus dikembalikan.³ Hal ini dengan segera dimanfaatkan Belanda untuk menguasai Indonesia melalui *NICA (Nederlands Indies Civil Administration)* yang telah dibentuk terlebih dahulu di Brisbane, Australia di bawah van Mook.

Usaha Pemerintah Belanda untuk menguasai Indonesia itu dengan sendirinya menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah RI. Kasus itu pula yang pada masa selanjutnya menjadi persengketaan Indonesia-Belanda yang penyelesaiannya memerlukan perjuangan baik secara fisik maupun secara diplomasi.

Sebenarnya, kedatangan pihak Belanda ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan merupakan usaha Belanda yang ketiga kalinya untuk menaklukkan Indonesia. Usaha pertama, terjadi pada abad XVII (17) dan XVIII (18), usaha itu berakhir setelah mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia dan akhirnya dikalahkan oleh Inggris. Usaha yang kedua dilakukan pada abad XIX (19) dan awal abad ke XX (20), usaha yang kedua ini berakhir dengan dikalahkannya Belanda oleh Jepang. Usaha yang ketiga dari Belanda dilakukan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dengan tujuan ingin menguasai Indonesia sekaligus.

Kedatangan Belanda untuk yang ketiga kalinya ini mendapat pertentangan yang luar biasa dari rakyat Indonesia, rakyat Indonesia benar-benar menentang dan melawan Belanda. Bagi rakyat Indonesia, ada rasa kebebasan yang mendorong kebanyakan dari mereka untuk menganggap dirinya sebagai pro

³ G. Moedjanto, 1988 : *Indonesia Abad ke 20 Jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 89.

Republik.⁴ Hal ini dibuktikan rakyat Indonesia dengan meletusnya perang melawan Belanda yang dianggap musuh oleh rakyat Indonesia.

Pada bulan Oktober tahun 1945, dimulailah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan Belanda. Pihak Jepang yang telah menandatangani penyerahan kepada pihak Sekutu merasa serba salah, karena di satu sisi pihak Jepang bersimpati dengan perjuangan rakyat Indonesia, sedangkan di lain pihak Jepang tidak bisa mengabaikan kewajiban mereka terhadap pihak Sekutu. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat, sehingga menjadi lambang perlawanan Nasional.⁵ Selain Surabaya, banyak juga kota-kota lainnya yang menjadi ajang pertempuran seperti, Bandung, Semarang, Magelang, Ambarawa, Malang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran di Surabaya, muncullah seorang tokoh pejuang yang berapi-api dalam tiap langkah perjuangannya dan orang itu adalah Soetomo atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan Bung Tomo.

Dengan banyaknya korban yang jatuh dalam perjuangan fisik, akhirnya kedua negara mengadakan perundingan untuk mengatasi ketegangan yang terjadi. Perundingan pertama dilaksanakan pada tanggal 30 September 1946, dalam perundingan itu dibicarakan mengenai gencatan senjata, akan tetapi perundingan itu mengalami kegagalan. Lord Killearn yang menjadi ketua panitia akhirnya berhasil membawa wakil-wakil pemerintah Indonesia dan Belanda ke meja perundingan, yang berlangsung di rumah kediaman konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946.⁶

⁴ M. C. Ricklefs, 2005 : *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi, Jakarta, hlm. 430.

⁵ *Ibid.*, hlm. 437.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1980: *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1949)*, Jakarta, hlm. 116.

Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan senjata yang gagal dalam perundingan tanggal 30 september 1946, menjadi topik pembicaraan yang utama dalam perundingan. Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan 7 Oktober 1946 itu diketuai oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, sementara Belanda diwakili oleh suatu komisi umum yang dikirim dari negeri Belanda yang diketuai oleh Prof. Schermerhorn.⁷ Perundingan itu akhirnya menghasilkan beberapa hal penting yang terdiri dari :⁸

1. Gencatan Senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu dan atas dasar kekuatan Sekutu serta Indonesia.
2. Dibentuk sebuah komisi bersama Gencatan Senjata, untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata.

Hasil dari perundingan itu, ternyata tidak merupakan hasil final, sehingga pada tanggal 10 November 1946 kedua belah pihak yakni, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan lagi. Perundingan kali ini diadakan di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, yang menjadi perantara masih Lord Killearn sedangkan Indonesia masih diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dan komisi umum yang dikirim dari kerajaan Belanda tetap dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Namun Sukarno dan Moh. Hatta yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden juga ikut hadir dalam perundingan itu.

Jalan ke arah kesepakatan politik diawali dengan persetujuan peletakan senjata yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 1946.⁹ Pada tanggal 15

⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

⁹ A. B. Lopian, dan P. J. Droogler, 1985: *Menelusuri JalurLinggarjati*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 4.

November, naskah persetujuan dari perundingan Linggarjati tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya

Dengan dicapainya persetujuan oleh kedua belah pihak belum berarti bahwa persetujuan itu terus bisa dilaksanakan. Persetujuan baru bisa dilaksanakan bila telah mendapatkan ratifikasi dari parlemen masing-masing untuk RI harus mendapatkan Ratifikasi dari KNIP.¹¹

Parlemen Belanda ataupun *Komite Nasional Indonesia Pusat* tidak langsung menerima persetujuan itu. Parlemen Belanda berpendapat bahwa terlalu banyak kekuasaan yang akan diberikan kepada Republik semasa peralihan, sedangkan dari pihak Indonesia atau KNIP tidak bersedia mengesahkan hasil perjanjian itu karena menguntungkan pihak Belanda tetapi akhirnya kedua belah pihak mau menyetujui hasil dari perjanjian itu.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 119.

¹¹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 182.

Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 1947 delegasi republik yang dipimpin Sutan Syahrir dan delegasi Belanda yang dipimpin Prof. Schermerhorn menandatangani persetujuan itu. Namun kedua belah pihak tetap mempertahankan hak untuk membuat interpretasi sendiri.¹²

Usaha untuk mempertahankan persetujuan itupun akhirnya gagal, hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran antara pihak Belanda dan Indonesia yang mempunyai interpretasi sendiri-sendiri. Dengan gagalnya upaya-upaya kompromi ataupun diplomasi, maka pada 27 Mei 1947, Pemerintah Belanda memberikan ultimatum dalam waktu 14 hari. Perdana menteri Syahrir menolak ultimatum itu, begitu juga pengganti Syahrir yaitu Amir Syarifuddin. Dengan demikian maka Belanda melancarkan agresi militer I pada tanggal 21 Juli 1947, tujuan Belanda dengan agresi militernya itu secara khusus tentunya untuk memaksa Republik Indonesia menerima visi Belanda mengenai Linggarjati, dan secara umum untuk menghancurkan Republik Indonesia.

Dalam agresi militer itu, Belanda menggepuk Jawa dengan persenjataan lengkap dan modern yang berjumlah tiga divisi, sementara di Sumatera mengerahkan tiga brigade. Kondisi TNI pada waktu itu terpecah karena serangan pertama Belanda, dan tindakan TNI selanjutnya membangun pertahanan baru. Taktik gerilya menjadi pilihan dan dilancarkan dalam menghadapi pasukan Belanda.

Di luar negeri, agresi militer Belanda ini mendatangkan reaksi keras. AS dan Inggris tidak setuju dengan Agresi Militer Belanda itu, tetapi ragu-ragu untuk

¹² A. B. Lopian dan P. J. Droogler, *op. cit.*, hlm. 5.

turun tangan. India dan Australia menjadi pembela utama Indonesia. India membela Indonesia karena solidaritas sesama bangsa Asia dan keberhasilan Syahrir dalam menjalin hubungan baik dengan India. Sedangkan Australia mendasarkan pembelaannya pada pasal 39 yang menyebutkan adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Selain itu, partai Buruh yang berkuasa di Australia juga bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal itu India dan Australia lalu mengajukan resolusi bersama kepada DK-PBB agar Belanda dan Republik Indonesia menghentikan permusuhan.¹³ Hasil dari resolusi itulah yang menjadi keputusan DK-PBB yang memerintahkan Indonesia dan Belanda pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan tembak-menembak. Indonesia dan Belanda harus melaksanakan kesepakatan tentang gencatan senjata yang akan dilaksanakan tanggal 4 dan 5 Agustus 1947. Keterlibatan Dewan Keamanan PBB ini terlihat dari pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) dengan anggotanya, Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Keterlibatan tiga negara ini selanjutnya disebut sebagai Komisi Jasa Baik. Dari kesepakatan tiga negara inilah nantinya menghasilkan perundingan Renville.

Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dibentuk suatu Komisi Konsuler yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa konsul Jenderal di Indonesia. Komisi Konsuler itu diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika *Dr. Walter Foote* dan beranggotakan Konsul (Jenderal) Cina, Belgia, Perancis, Inggris dan Australia. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa Belanda masih mengadakan gerakan-gerakan militer.¹⁴ Selain

¹³ G. Moedjanto, 1988: *Indonesia Abad ke 20 Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 16.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm.145.

itu Belanda juga melakukan kecurangan dalam penentuan garis batas kedudukan masing-masing, yaitu bagi Belanda disebut sebagai garis Demarkasi (van Mook).

Berdasarkan tugas yang dibebankan oleh Dewan Keamanan PBB, KTN (Komisi Tiga Negara) memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda secara damai. Pada tahap selanjutnya KTN berusaha mendekatkan kedua pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada yang nantinya dijadikan dasar dalam perundingan selanjutnya. Usaha dari KTN ternyata membuahkan hasil, Indonesia dan Belanda setuju untuk melakukan perundingan lagi. Atas usul KTN, perundingan dilakukan di atas sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “*USS Renville*” yang berlabuh di teluk Jakarta.

Persetujuan Renville dapat dianggap sebagai titik balik yang menentukan di dalam pembicaraan-pembicaraan Indonesia-Belanda yang akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 membawa kepada penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.¹⁵

Sebelum pelaksanaan perundingan Renville, banyak dilakukan perundingan-perundingan lainnya yang dijadikan dasar dari perundingan Renville tersebut. Perundingan-perundingan itu dilakukan antara Delegasi Belanda dan Delegasi Indonesia dengan bantuan Komisi Tiga Negara. Perundingan di atas kapal Renville itu dibantu oleh suatu komisi yang terdiri dari wakil-wakil tiga Negara, yang ditunjuk oleh pihak Indonesia dan Belanda serta ditunjuk secara bersama-sama. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia dan wakil-wakil dari Australia dan Belgia bersama-sama menunjuk Amerika Serikat.¹⁶

¹⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983: *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 50.

¹⁶ T. B. Simatupang, 1980: *Laporan Dari Banaran*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

Perundingan Renville ini akhirnya berhasil dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoatmodjo, seorang berkebangsaan Republik Indonesia yang memihak Belanda.

Hasil dari perundingan Renville pada mulanya ditolak oleh pihak Indonesia. Dengan pertimbangan apabila dilanjutkan perang dengan Belanda akan jatuh banyak korban sehingga pihak Indonesia menerima juga hasil dari perundingan Renville. Penandatanganan hasil dari perundingan Renville dilakukan pada tanggal 17 Januari dan 19 Januari 1948.

Dengan tercapainya persetujuan Renville, pertikaian Indonesia-Belanda akan diselesaikan dengan jalan damai lewat perundingan. Atas tercapainya persetujuan itu Graham memberi komentar "*From the bullet to the ballot*" yang artinya kira-kira "*dari peluru ke pemungutan suara*" (*dari peperangan ke plebisit atau penentuan pendapat rakyat*).¹⁷

Sejarah berulang lagi. Hasil dari perundingan Renville ternyata tidak bisa menghentikan permusuhan di antara Republik Indonesia dan Belanda. Perbedaan persepsi dalam menyikapi dan mengartikan hasil dari Perundingan Renville menjadi salah satu peningkaran hasil Perundingan Renville oleh Belanda. Pihak Belanda sering kali mengeluarkan tuntutan dan melakukan tindakan yang tidak mungkin diterima oleh pihak Republik Indonesia. Sedangkan pihak Republik Indonesia, mulai menginginkan pengakuan kedaulatan secara langsung. Oleh

¹⁷ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 23.

karena itulah, hasil dari perundingan Renville tidak bisa lagi menjadi penghalang dalam terjadinya konflik fisik yaitu pertempuran.

Dalam usaha memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia secara penuh, pihak Republik Indonesia dikejutkan dengan tindakan Amir Syarifuddin yang asalnya seorang pejuang berubah menjadi seorang pengkhianat. Dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang digantikan dengan kabinet Hatta, menimbulkan ketidakpuasan bagi Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, Amir Syarifuddin membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat).

Pada tanggal 18 September 1948, PKI/FDR melakukan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pengkhianatan dan pemberontakan itu nantinya dikenal sebagai Peristiwa Madiun. Sejak kedatangan Muso, seorang tokoh komunis, Amir Syarifuddin sangat bersemangat. Muso diharapkan akan dapat lebih mengobarkan api kebesaran dan kekuatan FDR.

Dalam usaha menguasai keadaan tahap awal terhadap pemberontakan PKI/FDR, Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi daerah Semarang, Pati, Madiun.

Pemberontakan PKI/FDR pertama kali dilakukan di Solo, kemudian pada tanggal 18 September 1948 PKI/FDR merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia".¹⁸ Untuk segera mengatasi pemberontakan PKI/FDR itu Pemerintah bertindak cepat. Propinsi Jawa Timur dijadikan Daerah Istimewa dan Kolonel Sungkono diangkat sebagai

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

Gubernur Militer. Karena Panglima Besar Jenderal Soedirman kebetulan sakit, pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Besar Komando Jawa (MBKD).¹⁹

Dalam operasi itu Muso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia menumpas pemberontakan PKI itu memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Amerika Serikat yang pada awalnya mulai yakin dengan propaganda Belanda bahwa Indonesia berpihak pada komunis, akhirnya berbalik keyakinan kalau Indonesia itu bangsa yang anti komunisme. Sedangkan dampak lanjutannya, Amerika Serikat tetap mendukung Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan penuh Republik Indonesia.

Dengan tidak adanya kesepakatan lebih lanjut antara pihak Republik Indonesia dan Belanda mengenai pelaksanaan isi dari perundingan Renville, maka pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Beel memberitahukan kepada delegasi Indonesia dan KTN bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville.

Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 06.00, agresi militer kedua dilancarkan oleh Belanda. Sekitar 500 tentara Belanda diterjunkan dengan payung udara. Dengan cepat mereka menguasai sebagian wilayah kota Yogyakarta. Selain itu penambahan pasukan dan pengadaan perbekalan terus dilakukan oleh Belanda yang dibawa dari pangkalan udara Semarang sekitar 80 km dari Yogyakarta.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 184.

Dengan itu, pesawat pembom dan penembak roket Belanda mulai menjinakkan Yogyakarta yang dibantu oleh serangan dari pasukan Marinir Belanda.²⁰

Dalam agresi militer yang kedua ini, pihak Belanda berhasil menawan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Presiden Sukarno diterbangkan ke Prapat dan Wakil Presiden Hatta ke Bangka. Presiden Sukarno kemudian dipindahkan ke Bangka. Tetapi sebelum mereka ditawan, Presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi kekuasaan negara kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera, untuk membentuk pemerintahan Darurat RI (PDRI). Andaikata Syafruddin tidak bisa menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk Pemerintah Pengasingan (*Exile Government*).²¹

Reaksi dunia atas agresi militer Belanda itu sangat luar biasa. Usaha yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi hal tersebut yakni memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya perundingan oleh Komisi Jasa Baik tanggal 14 April 1949 antara Dr. van Royen dan Mr. Moh Roem. Pada tanggal 7 Mei 1949 perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini memuat kesediaan Belanda untuk membebaskan pemimpin RI yang ditangkap. Salah satu isi penting dari perjanjian Roem-Royen adalah bahwa akan

²⁰ G. McT., Kahin, 1995: *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terjemahan Nin Bakdi Soemanto, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 427.

²¹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 42.

dilaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den-Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.

Usaha pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah Belanda sebenarnya merupakan kelanjutan perjuangan revolusi nasional. Perjuangan baru berakhir setelah Pemerintah Belanda mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, yaitu saat Pemerintah Belanda mengakui keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata merupakan bentuk negara yang mempunyai peranan penting bagi penyelesaian perselisihan Indonesia-Belanda. Arti penting itu ialah bahwa melalui bentuk negara serikat itu, maka perselisihan Indonesia-Belanda dapat diselesaikan tanpa menimbulkan bentrokan senjata antara kedua pihak.

Dengan diterimanya bentuk negara serikat oleh Pemerintah RI maka negara kesatuan RI segera diganti dengan bentuk negara baru itu, dan selanjutnya negara RI merupakan negara bagian dalam wilayah RIS yang sederajat dengan negara bagian lain. Dalam negara RIS yang menjabat sebagai Presiden ialah Sukarno dan Hatta sebagai wakilnya.

Hal yang menarik untuk diketengahkan ialah bahwa Pemerintah RIS ternyata tidak dapat bertahan lama, sebab negara RIS itu bubar pada tanggal 15 Agustus 1950 yang kemudian kembali ke bentuk negara kesatuan yaitu NKRI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengembalian Pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta?
2. Bagaimana jalannya perundingan dalam KMB dan pengakuan kedaulatan kepada RIS?
3. Apa dampak politik dan militer terhadap RIS setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis jalannya perundingan dalam KMB dan pengakuan kedaulatan kepada RIS.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak politik dan militer terhadap RIS setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain dalam penulisan skripsinya tentang perjuangan dan Revolusi Nasional yang pernah terjadi di Indonesia.
 - b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sejarah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong para pecinta sejarah untuk melakukan penelitian serupa baik terhadap tema yang sama tentunya dengan sudut pandang yang berbeda maupun terhadap banyak tema lain yang belum digali.

c. Bagi Peneliti/Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah sekaligus menambah pengetahuan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatannya secara penuh.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain atau dengan alat mekanis atau selanjutnya secara singkat disebut saksi pandangan mata.²²

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa sumber primer itu merupakan sumber yang didapat secara langsung dari orang pertama yang melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang terjadi atau terlibat langsung di dalam peristiwa itu. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

²² Louis Gottchalk., 1985: *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta, hlm. 35.

Pertama, karangan Noetosoetardjo “Konperensi Medja Bundar (Dokumen)” diterbitkan oleh penerbit Endang Jakarta, 1956, buku ini berisi tentang jalannya KMB sampai dengan hasil dari KMB.

Kedua, karangan Ide Anak Agung Gde Agung “ Dari Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat” diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 1986, buku ini ditulis secara lengkap dan kronologis mengenai perjalanan bangsa Indonesia menuju terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat.

Ketiga, karangan G. McT. Kahin “Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia” diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1995, buku ini memuat perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 1942-1950.

Keempat, karangan T.B. Simatupang “Laporan Dari Banaran” diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1980, buku ini berisi perjalanan bangsa Indonesia sebelum KMB sampai dengan terbentuknya Negara RIS.

Kelima, karangan A.H. Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 11” diterbitkan oleh Angkasa Bandung, 1979, buku ini berisi tentang KMB, pengakuan kedaulatan oleh Belanda, dan reaksi dunia Internasional.

Keenam, karangan Ali Sastroamidjojo “Tonggak-Tonggak Diperjalananku” diterbitkan oleh PT. Kinta Jakarta, 1972, buku ini berisi tentang pengalaman penulis yang terlibat langsung dalam perjuangan Bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Selain sumber-sumber primer di atas, ada juga sumber sekunder yang dapat digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder

merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.²³

Sedangkan menurut pendapat Nugroho Notosusanto bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau sumber lain.²⁴

Dari definisi di atas dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang kedua yaitu orang yang memperoleh sumber dari sumber sekunder. Jadi bukan dari tangan pertama melainkan diperoleh dari seseorang yang tidak langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi.

Buku-buku yang penulis gunakan dalam sumber sekunder ini adalah karangan G. Moedjanto yang berjudul *Indonesia Abad ke 20* yang terdiri dari dua jilid. Jilid I menguraikan tentang masa penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan, sedangkan jilid II menguraikan tentang agresi militer Belanda yang mengakibatkan jatuhnya kota Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin Republik Indonesia hingga KMB.

Selain itu ada juga buku yang ditulis oleh Basuki Suwarno yang berjudul *Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950*. Buku ini berisi petikan, tanggapan, komentar dari buku terbitan Den Haag yang dijadikan arsip oleh Belanda. Ada juga buku dari Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berjudul *30 Tahun Indonesia merdeka (1945-1949)* dan *30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)*, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid VI, terbitan Balai Pustaka yang dikarang oleh

²³ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁴ Nugroho Notosusanto, 1971: *Norma-Norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*, Dephankam, Jakarta, hlm. 19.

Sartono Kartodirjo, buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, terbitan Serambi, Jakarta, karangan M.C. Rieklefs.

E. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa konsep sebagai dasar landasan teori untuk penulisan. Konsep-konsep tersebut adalah pembentukan, pembubaran, Negara, dan Republik Indonesia Serikat.

Pembentukan dapat diartikan suatu proses, perbuatan, cara membentuk.²⁵ Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat berawal dari hasil KMB. Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama dan hanya berumur tidak lebih dari satu tahun. Dengan adanya Negara RIS, maka kedaulatan Negara Indonesia diakui oleh Belanda.

Dalam penulisan skripsi ini juga digunakan konsep pembubaran yang dapat diartikan proses kerja membubarkan.²⁶ Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat memiliki arti penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Negara RIS bubar, maka Indonesia dan Belanda tidak mempunyai keterikatan lagi. Pada tanggal 15 Desember 1950, Presiden Sukarno menyatakan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tanggal itu juga berarti Negara RIS dibubarkan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat/kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang

²⁵ Anton Moeliono, 1988: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 104.

²⁶ J.S. Badudu, 1994: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 130.

diorganisasi di bawah lembaga politik dan Pemerintah yang efektif serta mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²⁷

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah suatu negara berbentuk federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan antara Republik Indonesia, *Bijeenkomst Federal Overleeg (BFO)*, dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dihadiri juga oleh *United Nations Commission for Indonesian (UNCI)*.²⁸ Negara Republik Indonesia Serikat dibentuk pertama kali berdasarkan persetujuan yang tercapai pada konferensi-konferensi antara RI dan BFO di Yogyakarta dan Jakarta. Pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakanlah KMB, Melalui KMB inilah Negara RIS terbentuk.

Bentuk Negara RIS adalah Negara Serikat atau Negara Federasi. Negara Serikat (Federasi) merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari Negara Serikat itu. Negara-negara bagian itu pada awalnya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu Negara Serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu harus melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Kekuasaan asli ada pada negara bagian. Negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan Negara Serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang

²⁷ Anton Moeliono, *op. cit.*, hlm. 610.

²⁸ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, hlm. 174-175.

diserahkan oleh negara-negara bagian kepada Negara Serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan Negara, keuangan dan urusan pos.²⁹

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini ialah :

1. Kalau Dunia Internasional menolak penawanan pemimpin RI oleh Belanda, maka Pemerintah Belanda akan mengembalikan pemimpin-pemimpin RI ke Yogyakarta.
2. Kalau Pemerintah Belanda mempertimbangkan perubahan sikap AS terhadap RI yang semula menentang RI yang dipengaruhi PKI kearah mendukung RI yang melawan PKI, maka Belanda akan mengusahakan jalannya perundingan KMB.
3. Kalau sebagian besar rakyat Indonesia tidak menerima RIS, maka RIS akan bubar.

G. Metode dan Pendekatan

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan atau menggunakan metode penulisan yang berpatokan pada sumber-sumber yang telah ada. Dengan demikian, maka metode penulisan ini lebih

²⁹ C. S. T. Kansil, 2003: *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 4.

menekankan pada metode deskriptif analitis, karena melalui metode ini penulis dapat menguji, mendeskripsikan, menganalisis, menguraikan dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, dan ingin menggali teori-teori dasar serta konsep-konsep yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli terdahulu berdasarkan kausalitas, faktor kondisional dan determinan.

Penulis menggunakan 4 tahap dalam penulisan skripsi ini yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Keempat tahap tersebut adalah :

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Sebelum melakukan penulisan hal terpenting yang harus dilakukan adalah pengumpulan sumber baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa buku-buku, dokumen, serta laporan.

2. Kritik Sumber

Setelah semua sumber yang akan digunakan terkumpul maka dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan dan ketidakeaslian.³⁰ Kritik sumber terdiri dari kritik intern (meneliti kebenaran) dan kritik ekstern (mengetahui keaslian).

³⁰ Koentowijoyo, 1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm. 99.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, sebab dalam tahap ini sudah menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lampau yang di dalamnya mengandung aspek kronologis.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *historis*, politik, dan militer. Pendekatan *historis* digunakan untuk mengetahui perjuangan tokoh-tokoh dan para pemimpin Republik Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia secara penuh.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat peranan dari para pemimpin Republik Indonesia dalam melakukan perjuangan diplomasi terhadap Belanda dan untuk mengkaji berbagai aspek yang melandasi para pemimpin Republik Indonesia dalam mengambil keputusan pada saat sedang berunding dengan Belanda.

Pendekatan militer digunakan untuk mengetahui tindakan para pejuang Republik Indonesia terutama TNI dalam mengatasi serbuan Belanda ke wilayah RI. Selain itu, pendekatan militer digunakan juga untuk mengkaji bagaimana

peranan militer dalam menjaga wilayah RI dari gangguan keamanan pada waktu itu.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Pembentukan dan Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat 1949-1950” ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode dan pendekatan, serta sistematika penulisan.
- BAB II. Bab ini menyajikan uraian tentang pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
- BAB III. Bab ini menyajikan uraian tentang jalannya KMB serta pengakuan kedaulatan terhadap RIS.
- BAB IV. Bab ini menguraikan tentang dampak politik dan militer terhadap RIS setelah pengakuan kedaulatan.
- BAB V. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II, III dan IV.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa penulis ingin menguraikan proses pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta, jalannya KMB dan pengakuan kedaulatan kepada RIS serta dampak politik dan militer setelah pengakuan kedaulatan kepada RIS.

BAB II

PENGEMBALIAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Perjanjian Renville

Karena perundingan Linggarjati tidak dapat lagi menghentikan permusuhan antara bangsa Indonesia dan Belanda, maka harus ada cara lain yang menjadi media dalam menghentikan kontak fisik antar bangsa Indonesia dengan Belanda. Agresi militer Belanda yang pertama merupakan cerminan dari keegoisan Belanda karena pihak Belanda dengan sengaja melanggar isi dari perjanjian Linggarjati.

Sesuai dengan seruan Dewan Keamanan PBB, akhirnya RI dan Belanda untuk kesekian kalinya maju lagi ke meja perundingan dengan Komisi Tiga Negara bertindak sebagai penengah. Perundingan dilakukan di atas kapal Renville, suatu kapal pengangkut pasukan milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta, dan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dengan susunan delegasi sebagai berikut.³¹

1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan dua orang wakilnya Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Sukiman Wiryoanjoyo dari Masyumi.
2. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmodjo seorang tokoh NICA dengan wakilnya Dr. R. Soumokil.

³¹ Tuk Setyohadi, 2002: *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, Rajawali Cooperation, Jakarta, hlm. 71.

3. Komisi Tiga Negara : perwakilan Amerika Serikat adalah Dr. Frank Graham, perwakilan Australia adalah Richard Kirby, dan perwakilan Belgia adalah Paul van Zeeland.

Dalam perundingan Renville, kemacetan dalam perundingan masih menjadi masalah besar. Usul dari KTN mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB yang berpegang pada garis demarkasi tanggal 4 Agustus 1947 ditolak oleh delegasi Belanda yang tetap berpegang pada garis demarkasi tanggal 28 Agustus 1947. Atas tekanan dari KTN, pihak Indonesia harus menelan pil pahit dengan menerima Garis van Mook yang berarti keharusan mengosongkan kantong-kantong basis gerilya di Jawa Barat.

Kemacetan yang menjadi penghambat dalam perundingan Renville adalah : ³²

1. Masalah pembentukan Negara Indonesia Serikat
2. Masalah pembentukan Pemerintahan Interim
3. Masalah Unie-Indonesia-Belanda
4. Masalah Plebisit

Dari keempat masalah tersebut, yang paling sulit diselesaikan dalam perjanjian Renville adalah masalah Pemerintahan Interim, mengenai kedudukan TNI dan hubungan Luar Negeri dari Republik Indonesia.³³

Dalam kelanjutan perundingan, atas tekanan KTN yang lebih condong memihak Belanda dalam merumuskan naskah persetujuan, maka ditandatangani naskah persetujuan pada tanggal 17 Januari 1948 oleh ketiga

³² *Ibid.*, hlm. 72.

³³ *Ibid.*, hlm. 73.

pihak, Indonesia-KTN-Belanda. Naskah Perjanjian Renville yang mencakup 12 pokok dasar dan 6 dasar tambahan pada hakekatnya merupakan desakan dari KTN yang sangat merugikan pihak Indonesia, antara lain rumusan tentang ke-4 masalah krusial yang intinya adalah sabagai berikut :³⁴

Negara Indonesia Serikat : pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat masih akan ditentukan lebih lanjut oleh Belanda, terdiri dari semua Negara bagian yang sudah ada dan masih akan didirikan, di mana RI akan bergabung sebagai Negara bagian yang sederajat dengan negara-negara bagian lainnya.

Pemerintahan Interim ialah Pemerintahan Sementara sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk di mana kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda tetap berada di tangan Kerajaan Belanda.

Unie Belanda-Indonesia akan terdiri dari kerajaan Belanda dan NIS yang sama tinggi kedudukannya dalam ikatan secara riil, di mana akan dibentuk badan-badan yang bertindak atas nama Raja keturunan “Oranye Nasau” yang mengurus semua sektor yang menyangkut kepentingan bersama seperti : hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, ekonomi serta pendidikan dan kebudayaan.

Plebisit ialah pemungutan suara yang akan dilaksanakan dalam waktu 6 dan 12 bulan di daerah-daerah Jawa, Sumatera dan Madura untuk menentukan apakah rakyat akan turut dalam RI atau mau masuk dalam negara bagian lainnya di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

Terhadap hasil dari perundingan Renville, didapat dua reaksi sangat keras yang datangnya dari luar negeri ataupun dalam negeri. Dari luar negeri datangnya dari Wakil Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB yaitu Gromyko yang menyatakan KTN terlalu menekan pihak Republik Indonesia demi keuntungan Belanda. Sedangkan dari dalam negeri datangnya dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa status TNI hanya dapat berubah bilamana telah dibentuk Angkatan Perang Negara Indonesia Serikat yang beranggotakan seluruhnya dari orang-orang Indonesia.

Selain reaksi dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, pada dasarnya delegasi Indonesia dalam perundingan Renville, Presiden dan Wakil Presiden, partai-partai besar di Indonesia seperti Masyumi dan PNI juga menolak hasil dari perundingan Renville tersebut. Tetapi laporan dari berbagai Panglima tentara kepada Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa persediaan amunisi menipis, serta adanya kepastiaan bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat, dan keterangan KTN bahwa Dewan Keamanan PBB belum tentu bisa menolong Indonesia menyebabkan pemimpin-pemimpin RI bersedia menerima persetujuan Renville.³⁵

Penandatanganan Persetujuan Renville menimbulkan suatu krisis kepercayaan dalam Negara Republik Indonesia. Dengan hilangnya dukungan dari PNI dan Masyumi sebagai partai besar terhadap Amir Syarifuddin menyebabkan pegunduran diri Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri.³⁶ Pembentukan suatu

³⁵ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 22.

³⁶ G. McT. Kahin, *op. cit.*, hlm. 290.

kabinet presidential yang bersifat nasional dan mencakup semua organisasi politik dan organisasi masyarakat dinilai cara yang tepat untuk menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. ³⁷

Pada tanggal 23 Januari 1948 Perdana Menteri RI Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan maka Presiden Sukarno menunjuk Moh. Hatta sebagai pembentuk kabinet baru. Hatta kemudian pada tanggal 24 Januari 1948 pukul 02.00 mengumumkan susunan kabinet baru yang antara lain Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. ³⁸ Program kerja kabinet Hatta antara lain: berusaha melaksanakan Perjanjian Renville, mempercepat pembentukan Negara Indonesia Serikat, dan mengadakan rasionalisasi dan pembangunan. ³⁹

Hampir segera, kabinet Hatta mulai melaksanakan syarat-syarat Persetujuan Renville yang paling tidak dapat diterima, yaitu pengakuan atas garis van Mook. Akibatnya, pasukan-pasukan terbaik Republik harus meninggalkan banyak kantong gerilya yang mereka duduki di balik sisi garis van Mook dan pindah ke wilayah terkepung yang masih dikuasai Republik. ⁴⁰

Secara bertahap Pemerintah RI pada awal bulan Februari 1948 mulai melaksanakan isi perjanjian Renville, yaitu dengan jalan menarik mundur tentara RI dari daerah pendudukan Belanda. Penarikan itu selesai pada awal bulan April 1948. Komisi Tiga Negara dalam pernyataannya di Kaliurang pada tanggal 23 Januari 1948 di hadapan delegasi RI maupun Belanda menyatakan bahwa

³⁷ *Ibid.*, hlm. 292.

³⁸ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 24 Djanuari 1948.

³⁹ G.McT. Kahin, *op. cit.*, hlm. 293.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 293.

penarikan tentara RI dapat berjalan lancar dan telah mencapai 35665 orang.⁴¹ Sementara itu Pemerintah Belanda juga melepaskan tawanan RI sebanyak 1500 orang dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.⁴² Namun demikian hubungan RI-Belanda masih tetap tegang karena tindakan Gubernur Jenderal van Mook yang mendirikan beberapa negara bagian baru. Negara baru itu ialah Negara Pasundan yang didirikan pada tanggal 15 Maret 1948 dan Negara Madura yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1948.

Hubungan kedua negara itu menjadi bertambah tegang lagi ketika wakil RI di Praha Suripno membuka hubungan tingkat konsuler dengan Uni Soviet pada tanggal 24 April 1948. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1948 utusan tertinggi Pemerintah Belanda Neher dan wakil ketua delegasi Belanda van Vredenburg tiba di Kaliurang untuk menyerahkan nota singkat kepada Hatta. Isi dari nota itu ialah permintaan Pemerintah Belanda agar RI menjauhi Suripno dan mengingkari tindakannya membuka hubungan tingkat konsuler dengan Uni Soviet. Pada tanggal 10 Juni 1948 nota itu dijawab, bahwa Pemerintah RI tidak dapat menghentikan hubungannya dengan luar negeri, terkecuali ada perjanjian yang mengikat antara RI dengan Belanda.⁴³

Pada tanggal 29 Juni 1948 anggota KTN dari Amerika Serikat Coert Dubois mengundurkan diri dan diganti oleh Merle Cochran, sedang di Negeri Belanda pada tanggal 7 Agustus 1948 terjadi pelantikan kabinet baru, yaitu kabinet Drees menggantikan kabinet Beel.⁴⁴ Beel untuk selanjutnya pada tanggal

⁴¹ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 9 April 1948.

⁴² *Ibid.*, tanggal 16 April 1948.

⁴³ *Ibid.*, tanggal 25 April 1948.

⁴⁴ *Ibid.*, tanggal 9 Agustus 1948.

3 November 1948 dilantik menjadi wakil tinggi Pemerintah Belanda di Indonesia yang menggantikan van Mook yang telah mengundurkan diri pada tanggal 1 November 1948.

Sehari setelah pelantikan wakil tinggi Pemerintah Belanda yaitu pada tanggal 4 November 1948, di Kaliurang diadakan perundingan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Belanda Stikker dan Perdana menteri RI Moh. Hatta. Perundingan itu berlangsung sampai tanggal 9 November 1948. dalam perundingan itu Pemerintah RI menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Belanda dalam rangka pembentukan Pemerintah Federal Sementara bagi seluruh Indonesia pada tanggal 1 November 1948. Dalam Pemerintah Federal Sementara nanti angkatan perangnya akan dibentuk oleh Pemerintah Federal. Pernyataan delegasi RI itu tidak dapat diterima oleh delegasi Belanda, karena tidak sesuai dengan tuntutan Pemerintah Belanda yang menghendaki pembubaran tentara RI selama masa peralihan.⁴⁵

Perundingan dilanjutkan lagi pada tanggal 27 November 1948 di Kaliurang. Delegasi Belanda terdiri dari: Menteri Luar Negeri Stikker, Menteri Seberang Lautan Sasseen dan Utusan Tertinggi Belanda Neher. Perundingan berlangsung sampai tanggal 30 November 1948. Dalam perundingan itu Pemerintah RI tetap bertahan pada pendiriannya agar tentara RI ditampung dalam angkatan perang selama masa peralihan, tetapi Pemerintah Belanda juga tetap bertahan pada pendiriannya agar tentara RI dibubarkan. Karena perbedaan pendapat itu maka perundingan mengalami kegagalan lagi.⁴⁶

⁴⁵ Suryo Sumarwoto, *op. cit.*, hlm. 162.

⁴⁶ Aminuddin Junus, 1950: *Garis Politik Hatta*, Penabur, Bukit Tinggi, hlm. 187.

Kegagalan dalam perundingan itu mengakibatkan Wakil Tinggi Pemerintah Belanda Beel mengirim surat ancaman kepada Pemerintah RI. Surat ancaman itu disampaikan oleh pejabat ketua delegasi Belanda Elink Shuurman melalui Merle Cochran dari KTN di Kaliurang pada tanggal 17 Desember 1948. surat ancaman itu berisi permintaan agar Pemerintah RI mau menerima konsep Pemerintah Belanda mengenai Pemerintah Sementara Indonesia Serikat, yang harus dijawab paling lambat tanggal 18 Desember 1948 jam 10.00.⁴⁷ Karena Pemerintah RI tidak menanggapi permintaan Belanda, maka Elink Shuurman pada tanggal 18 Desember 1948 menyampaikan surat lagi kepada Merle Cochran dari KTN yang waktu itu berada di Jakarta. Isi dari surat itu menegaskan bahwa Pemerintah Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan Gencatan Senjata.⁴⁸

B. Agresi Militer Belanda II

Pertikaian yang terjadi di kalangan Republik Indonesia sebagai akibat dari Perjanjian Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasionalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI yang menelan daya upaya dan kekuatan Republik, memberikan kesempatan baik bagi Belanda untuk lebih menekan Republik Indonesia.⁴⁹

Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu sebab Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima oleh pihak Republik Indonesia. Tindak lanjut dari

⁴⁷ A.H. Nasution, 1979: *Sekitar Perang Kemerdekaan : Agresi Militer Belanda II*, Angkasa, Bandung, hlm. 159-160.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 215.

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 191.

tindakan pihak Belanda setelah pengingkaran perjanjian Renville adalah penyerangan terhadap Republik Indonesia untuk kedua kalinya.⁵⁰

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia sudah menyadari bahwa hubungannya dengan Belanda benar-benar memburuk karena perbedaan persepsi mengenai isi dari perjanjian Renville, Republik Indonesia sebenarnya tidak mengharapkan adanya serangan dari pihak Belanda. Khususnya dengan Komisi Jasa-jasa Baik yang masih berada di wilayah Republik Indonesia, di Kaliurang, yang hanya berjarak 15 km dari kota Yogyakarta.⁵¹

Perkiraan Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Jasa-jasa Baik itu ternyata salah karena pada pagi hari tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan aksi militer terhadap Jawa dan Sumatera. Di Yogyakarta aksi militer itu berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo pada pagi hari pukul 06.00 dan selanjutnya pada pukul 14.00 tentara Belanda berhasil masuk kota. Pada pukul 15.00 tentara Belanda memasuki Istana Presiden di Yogyakarta dan menawan Presiden, Wakil Presiden serta sejumlah Menteri. Para pemimpin RI yang ditawan itu antara lain : Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, H.A. Salim, Moh. Roem, Ali Sastroamidjojo, Sutan Syahrir, Assaat, A.G. Pringodigdo, dan Komodor Surjadarma. Sebelum penangkapan itu, Presiden Sukarno masih sempat memberikan mandat melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).⁵²

⁵⁰ A.B.Lapian, dkk, 1983: *Terminologi Sejarah Indonesia 1945-1950 & 1950-1959*, Depdikbud, Jakarta, hlm.5.

⁵¹ G. McT. Kahin, *Nasionalism and Revolution in Indonesian*, *op. cit.*, hlm. 426-427.

⁵² Sartono Kartodirjo, 1975: *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 62.

Selama seminggu berikutnya, pasukan bersenjata Belanda dengan bantuan kuat dari angkatan udara, telah berhasil merebut kota-kota penting yang masih dikuasai pihak Republik Indonesia di pulau Jawa dan Sumatera. Kepada dunia luas, Belanda melaporkan bahwa hanya mendapat sedikit perlawanan dari Republik Indonesia dan bahwa penduduk menerima kedatangan pasukan mereka sebagai penyelamat.⁵³

Agar keberhasilan pihak Belanda lebih terjamin, mereka memperkeras sensor terhadap berita-berita yang keluar dari Indonesia sehingga fakta-fakta yang sebenarnya tidak dapat diketahui. Sensor ini baru dicabut pada tanggal 1 Januari 1949. Di samping itu, pihak Belanda tidak mengizinkan KTN menggunakan pesawatnya untuk tujuan-tujuan pengamatan. Namun demikian, sensor keras dari pihak Belanda itu diimbangi oleh usaha yang sangat keras dan tidak mengenal lelah dari pihak Republik Indonesia yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di luar negeri.⁵⁴

Untuk melanjutkan perjuangan maka Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 19 Desember 1948 mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi.⁵⁵ Susunan PDRI yang dibentuk ialah : Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, Mohammad Hassan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap Menteri Dalam Negeri dan Agama, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, Sutan Rasjid sebagai Menteri Sosial merangkap Menteri Perburuhan dan Pembangunan serta Keamanan, Sitompul

⁵³ G. McT Kahin, *Nasionalism and Revolution in Indonesian*, *op. cit.*, hlm. 429.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 430.

⁵⁵ Dinas Sejarah Militer Kodam VII Diponegoro, 1977: *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*, CV Borobudur, Semarang, hlm. 296.

sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Kesehatan, dan Inderatjaja sebagai Menteri Perhubungan dan Kemakmuran.

Pada waktu Belanda mengadakan aksi militer tanggal 19 Desember 1948, tentara RI yang berada di Yogyakarta ialah Brigade X Divisi III pimpinan Letkol Soeharto, tetapi sebagian dari tentara itu telah tersebar ke daerah Kebumen, Gombong, dan Purworejo untuk menjaga kemungkinan tentara Belanda menyerang dari daerah-daerah tersebut.⁵⁶ Untuk mengadakan penyerangan balasan terhadap tentara Belanda, maka Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Brigade X Divisi III membagi daerah Yogyakarta menjadi 4 sektor pertahanan, yaitu Sektor Barat pimpinan Mayor Vense Sumual, Sektor Utara pimpinan Mayor Kasno, Sektor Timur pimpinan Mayor Jono, dan Sektor Selatan pimpinan Mayor Sarjono.⁵⁷

Sementara itu untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di Jawa, maka pada tanggal 22 Desember 1948 Komandan Markas Besar Komando Jawa (MBKD) Kolonel Abdul Haris Nasution mengumumkan berlakunya Pemerintahan Militer di Jawa.⁵⁸ Dengan dibentuknya Pemerintahan Militer diharapkan perjuangan Negara RI sebagai negara yang sah dapat berlanjut terus. Di samping itu Pemerintahan Militer juga merupakan alat perjuangan demi keselamatan negara. Susunan Pemerintahan Militer itu terdiri dari : Panglima Besar Angkatan Perang, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Gubernur

⁵⁶ A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 226.

⁵⁷ Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hal. 87.

⁵⁸ A.H. Nasution, 1964: *Pokok-Pokok Gerilja*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 118.

Militer, Sub Teritorial Komando, Komando Distrik Militer, Komando Onder Distrik Militer, dan Lurah.⁵⁹

Selain membentuk Pemerintahan Militer di Jawa, A. H. Nasution dengan bermodalkan pengalaman yang diperoleh selama menghadapi agresi militer Belanda I dan perjuangan bersenjata sebelumnya, membuat konsepsi baru mengenai bidang pertahanan yang dituangkan dalam Perintah Siasat No. 1 Tahun 1948 yang pokok isinya ialah sebagai berikut :⁶⁰

1. Tidak melakukan pertahanan yang linear.
2. Memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total.
3. Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan.
4. Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

Bersamaan dengan pembentukan Pemerintahan Militer dan siasat militer itu, para pemimpin RI yang ditawan di Istana Presiden oleh pihak Belanda dipindahkan ke Bangka. Pemindahan itu dikarenakan oleh penolakan Presiden Sukarno terhadap permintaan komandan tentara pendudukan Kolonel van Langen untuk menghentikan serangan tentara RI terhadap tentara Belanda.⁶¹ Walaupun

⁵⁹ Saleh A. Djamhari, 1967: *Markas Besar Komando Djawa*, Lembaga Sedjarah Hankam, Djakarta, hal. 113.

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 192-193.

⁶¹ Adam Malik, 1978: *Mengabdikan Republik*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 208.

para pemimpin RI sudah diasingkan, tetapi semangat perjuangan tidak mengendor khususnya di bidang militer. Hal ini dibuktikan adanya beberapa serangan yang dilakukan oleh tentara RI, antara lain yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 1948 malam hari. Dalam serangan itu tentara RI berhasil masuk kota Yogyakarta. Serangan itu bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tentara RI benar-benar masih ada. Serangan lain yaitu yang dilakukan pada pertengahan dan akhir bulan Januari 1949 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Korban yang timbul pada kedua pihak akibat serangan itu tidak diketahui secara pasti.

Pada bulan Februari 1949 tentara RI mengadakan persiapan untuk melakukan serangan umum ke kota Yogyakarta. Persiapan itu dilakukan dengan mengadakan serangan ke pos-pos di luar kota untuk mengelabui perhatian tentara Belanda, seolah-olah tentara RI tidak menyerang kota sehingga tentara Belanda lengah. Dalam keadaan lengah itu maka tentara RI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto melakukan penyerangan ke kota Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dari segala penjuru. Selain serangan umum terhadap kota Yogyakarta, TNI juga mengadakan serangan besar atas kota Solo yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Rijadi.

Serangan umum itu dilakukan pada pagi hari dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tujuan serangan itu untuk memperlihatkan kepada dunia Internasional bahwa tentara RI masih tetap ada. Sementara itu perundingan untuk mengatasi perselisihan antara kedua pihak masih terus dilakukan.

Selain serangan Umum 1 Maret 1949 dan serangan terhadap kota Solo yang mempunyai arti penting, ada beberapa titik balik atau respon dari pihak Indonesia terhadap agresi militer Belanda itu, terutama dari TNI. Adapun respon dari TNI terhadap agresi militer Belanda yang juga mempunyai arti penting ialah:⁶²

1. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya.

Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta dalam keadaan sakit parah untuk memimpin perang gerilya. Jenderal Sudirman dan anggota TNI lainnya terlibat pertempuran dengan Belanda di lereng sebelah timur Gunung Wilis.

2. TNI beralih ke strategi ofensif.

Pihak Belanda sempat dibuat kewalahan karena strategi ini. Pasukan TNI ada di mana-mana untuk melakukan perlawanan.

3. TNI melakukan *Long March*.

Pasukan TNI yang telah meninggalkan daerah-daerah kantong kembali lagi untuk menyusup dan melakukan perang gerilya.

4. Penghadangan di jalan raya Madiun-Surabaya.

Pasukan Belanda yang sering berpatroli di daerah itu dan membawa perbekalan sering kali diserang oleh Tentara Genie Pelajar (TGP). Dengan istilah lain pasukan Belanda itu akan terus menjadi sasaran empuk sampai Belanda menghentikan agresi militernya.

⁶² Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 85-89.

C. Indonesia – Belanda – BFO

Perundingan dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia diplomasi Republik Indonesia. Ketika itu, sekalipun tanah air kita telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai negara, namun kecuali negara-negara anggota Liga Arab, kebanyakan negara masih menunggu sampai wilayah yang dulunya bernama Nederlands Indie atau Hindia Belanda diakui oleh bekas penjajahnya, yaitu Negeri Belanda.⁶³

Sebelum diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB), ada dua langkah penting yang dilakukan oleh pihak Republik Indonesia. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan BFO (*Bijeenkomst Federal Overleg*) serta melakukan perundingan Roem-Royen. Pendekatan dan koordinasi dengan BFO dilakukan dengan tujuan membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat dan untuk menciptakan satu front dalam menghadapi Belanda.⁶⁴ Langkah penting yang dilakukan dengan Belanda ialah dalam bentuk perundingan lagi. Perundingan Roem-Royen memberikan arti penting bagi perjuangan Republik Indonesia karena salah satu hasil penting dalam perundingan Roem-Royen adalah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta.⁶⁵

BFO ialah organisasi calon negara-negara bagian RIS yang dibentuk di Bandung pada tanggal 16 Juli 1947 oleh Belanda. Sedangkan perundingan Roem-royen adalah perundingan yang dilakukan antara RI dengan Belanda sebelum diadakan KMB. Dalam perundingan itu RI diwakili oleh Moh. Roem dan pihak Belanda diwakili oleh van Royen (Roijen).

⁶³ Moh. Roem, 1989: *Diplomasi : Ujung Tombak Perjuangan RI*, Gramedia, Jakarta, hlm. 3.

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 229.

⁶⁵ Moh. Roem, *op. cit.*, hlm. 76.

Di Bangka pada tanggal 3 Februari 1949 Hatta menerima surat dari BFO yang maksudnya ingin mengadakan pertemuan antara RI dengan BFO.⁶⁶ Surat seperti itu dikirim pula kepada Presiden Sukarno di Prapat. Pada surat yang dikirimkan kepada kedua pemimpin RI itu terlampir pula surat Wakil Tinggi Pemerintah Belanda Beel kepada Sultan Hamid II tertanggal 31 Januari 1949 yang isinya menyebutkan bahwa para pemimpin RI yang ditawan merupakan orang-orang pemerintahan dari suatu negara yang statusnya akan ditentukan oleh rakyat. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa kebebasan bergerak bagi para pemimpin RI yang ditawan dapat dibicarakan dengan BFO, dan Beel menyetujui hal itu.⁶⁷

Pada tanggal 4 Februari 1949 Moh. Hatta menjawab surat dari BFO itu. Dalam jawabannya Hatta menyatakan bahwa surat Beel kepada Sultan Hamid II tertanggal 31 Januari 1949 menganggap para pemimpin RI yang ditawan merupakan orang-orang Pemerintahan dari suatu negara yang belum ada. Karena itu Hatta menolak mengadakan perundingan dengan BFO.⁶⁸ Dalam jawabannya itu Hatta juga menyatakan bahwa soal Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, kalau Pemerintah RI maupun Belanda mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949.⁶⁹ Untuk pelaksanaan itu diperlukan syarat, yaitu Pemerintah RI harus bersidang dulu secara lengkap dengan para menterinya. Persetujuan terhadap Resolusi 28 Januari 1949 baik oleh RI maupun Belanda harus dinyatakan bersama setelah perundingan tercapai antara RI-BFO-

⁶⁶ G.J. Wolhoff, 1955: *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara Republik Indonesia*, NV Timun Mas, Djakarta, hlm 214.

⁶⁷ Ali Sastroamidjojo, 1972: *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, PT Kinta, Jakarta, hlm. 257.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 257-258.

⁶⁹ Moh. Roem, 1972: *Bunga Rampai dari Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 95-96.

Belanda di bawah UNCI (Pengganti KTN),⁷⁰ yang sekaligus membicarakan pembentukan Pemerintah Federal Sementara, penghentian aksi militer, dan pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta. Hatta juga menyatakan bahwa RI akan setuju dengan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat asal strukturnya ditentukan oleh Badan Konstituante yang dipilih oleh rakyat secara bebas dan rahasia, sedang kedudukan RI harus sama dengan negara bagian lain.

Presiden Sukarno dalam menjawab surat dari BFO belum menentukan pendapatnya, melainkan minta waktu kepada Sultan Hamid II untuk menemui Hatta di Bangka lebih dulu. Pada tanggal 6 Februari 1949 Presiden Sukarno dan Haji Agus Salim berangkat ke Bangka untuk menemui Hatta. Dalam pembicaraannya dengan Hatta di Bangka, Presiden Sukarno maupun Haji Agus Salim setuju dengan pendirian Hatta seperti yang tercantum dalam surat Hatta kepada Sultan Hamid II tertanggal 4 Februari 1949.⁷¹

Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 26 Februari 1949, Presiden Soekarno mendapat undangan dari Pemerintah Belanda, yang maksudnya agar Presiden Sukarno membentuk delegasi untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang akan diadakan pada tanggal 12 Maret 1949. Dalam surat undangan itu dinyatakan bahwa KMB akan membicarakan tentang pengakuan kedaulatan yang dipercepat dari Belanda kepada bangsa Indonesia, para pemimpin RI yang ikut KMB akan diberi kebebasan bergerak dan berpendapat; di samping itu bantuan dari UNCI merupakan syarat mutlak.

⁷⁰ Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 90.

⁷¹ Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 257.

Presiden Sukarno menjawab undangan itu pada tanggal 4 Maret 1949. Dalam jawabannya Presiden Sukarno menyatakan bahwa gagasan untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat yang dipercepat adalah menarik, dan merupakan jalan satu-satunya untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Belanda. Dikatakan pula bahwa Presiden Sukarno menyetujui KMB, tetapi karena para pemimpin RI masih dalam status tahanan maka Presiden Sukarno tidak dapat menghadiri undangan Pemerintah Belanda di KMB, kecuali Pemerintah RI dikembalikan lebih dulu ke Yogyakarta.⁷²

Pendirian Pemerintah RI itu berbeda dengan pendirian BFO yang disampaikan pada pertemuan di Bangka tanggal 3 Maret 1949. Pada pokoknya delegasi BFO yang dipimpin Sultan Hamid II dalam pembicaraan itu menyatakan bahwa BFO akan mengirimkan wakilnya ke KMB yang akan diadakan pada tanggal 12 Maret 1949 sesuai dengan undangan Pemerintah Belanda tertanggal 26 Februari 1949.⁷³ Pendirian BFO itu berubah setelah Moh. Hatta memberi pengarahan kepada delegasi BFO untuk tidak menghadirinya. Akhirnya delegasi BFO memutuskan untuk tidak menghadiri KMB kalau delegasi RI tidak hadir. BFO kemudian mengeluarkan suatu resolusi yang mendesak Pemerintah Belanda agar mau menerima tuntutan RI untuk mengembalikan Pemerintah RI ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda menolak terhadap permintaan BFO itu, dan akhirnya perundingan mengalami jalan buntu.⁷⁴

⁷² Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 246-247.

⁷³ *Ibid.*, hal. 249-251.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 252.

Persoalan itu kemudian diambil alih oleh Dewan Keamanan, yang kemudian mengadakan sidang pada tanggal 11 Maret 1949. dalam sidang itu wakil dari Kanada Jenderal Mc. Naughton mengajukan usul agar UNCI membantu pihak yang bersengketa untuk menentukan tanggal dan syarat-syarat penyelenggaraan KMB. Di samping itu kedua pihak harus menyetujui bahwa perundingan di bawah UNCI tidak akan merugikan Resolusi Dewan Keamanan 28 Januari 1949 maupun kedua pihak yang bersengketa.⁷⁵

Perundingan kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 1949. Palar wakil RI di Dewan Keamanan menyatakan agar Pemerintah Belanda melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan 28 Januari 1949. Dikatakan pula bahwa Pemerintah RI bersedia untuk mengadakan pendahuluan yang akan diadakan di bawah pengawasan UNCI. Wakil Belanda van Rooyen juga menyatakan setuju dengan usul wakil dari Kanada itu. Usul itu kemudian diterima oleh Dewan Keamanan pada tanggal 23 Maret 1949 yang kemudian terkenal dengan nama instruksi Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949. Atas dasar instruksi Dewan Keamanan itu maka UNCI mengirimkan undangan yang ditujukan kepada delegasi RI dan Belanda untuk menghadiri pembicaraan yang akan diadakan pada tanggal 30 Maret 1949 di Jakarta. Perundingan itu kemudian berhasil diadakan di Jakarta pada tanggal 14 April 1949 yang diketuai oleh Merle Cochran dari UNCI. Dalam perundingan itu Belanda diwakili oleh van Rooyen dan Bloom, sedangkan RI diwakili oleh Mr. Moh. Roem dan Ali Sastroamidjojo.⁷⁶

⁷⁵ Moh. Roem, *op. cit.*, hlm. 95-96.

⁷⁶ Aminuddin Junus, *op. cit.*, hlm. 192.

Perundingan Indonesia-Belanda yang berakhir pada tanggal 7 Mei 1949 itu berhasil membuat suatu pernyataan bersama dari kedua delegasi. Dalam pernyataan itu Moh. Roem selaku ketua delegasi RI dan atas nama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan kesanggupannya untuk memerintahkan kepada para pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, mengusahakan kerjasama demi pulihnya perdamaian, dan turut serta dalam KMB yang akan diadakan di Den Haag. Pada tanggal yang sama van Rooyen selaku ketua delegasi Belanda dan atas nama Pemerintah Belanda menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan Pemerintah RI ke Yogyakarta termasuk pengembalian tawanan politik, Pemerintah Belanda bersedia menghentikan operasi militer dan tidak akan mengakui negara di luar RI sebelum tanggal 18 Desember 1949, dan secepat mungkin mengadakan KMB setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.⁷⁷ Perundingan itu kemudian terkenal dengan nama persetujuan Roem-Rooyen.

Setelah tercapai persetujuan Roem-Rooyen itu, maka pada tanggal 5 Juni 1949 Moh. Hatta dan rombongannya yang terdiri dari: Dr. Sukiman, Dr. Harlim, Mr. Natsir, St. Pamuncak dan Ali Sastroamidjojo pergi ke Banda Aceh untuk menemui para pemimpin PDRI. Dari PDRI yang hadir ialah Menteri Keuangan Lukman Hakim. Moh. Hatta memberi penjelasan kepada PDRI bahwa persetujuan Roem-Rooyen merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai. Berdasarkan persetujuan itu Belanda akan menarik tentaranya dari wilayah RI, sedangkan

⁷⁷ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 53.

Pemerintah RI dan para pemimpin lain yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta.⁷⁸

Sementara itu pada tanggal 18 Juni 1949 Sri Sultan Hamengku Buwono IX atas nama Pemerintah RI mengeluarkan perintah penghentian tembakan kepada tentara RI. Perintah itu ditaati sehingga pada tanggal 24 Juni 1949 tentara Belanda mulai ditarik dari daerah Yogyakarta. Penarikan tentara Belanda dilakukan dari daerah sebelah selatan kota Yogyakarta menuju ke utara kemudian masuk kota, dan terus ke luar kota lewat jalan Magelang menuju ke utara. Penarikan tentara Belanda itu selesai pada tanggal 30 Juni 1949.

kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet. Dalam sidang itu Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.⁷⁹

Sementara itu pada tanggal 22 Juni 1949 telah disepakati bersama antara Pemerintah Belanda-BFO-RI mengenai syarat-syarat dalam KMB. Dalam persetujuan itu dinyatakan bahwa KMB akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 1949 dan berlangsung paling lama 2 bulan, yang akan diikuti oleh wakil dari Belanda, RI dan BFO.

Di samping itu di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 juga diadakan konferensi antara RI dan BFO, yang kemudian dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Hasil konferensi itu ialah BFO tidak keberatan

⁷⁸ Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 280.

⁷⁹ A.H. Nasution, 1979: *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Periode KMB*, Angkasa, Bandung, hlm. 205.

menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda asal penyerahan itu tanpa syarat, artinya penyerahan kedaulatan itu tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi.

Dengan selesainya konferensi antara Belanda-BFO-RI pada tanggal 22 Juni 1949 dan konferensi antara BFO-RI pada tanggal 2 Agustus maka tugas selanjutnya ialah mengadakan KMB.

Satu hal yang perlu mendapat catatan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia yang dikembalikan oleh pihak Belanda ke Yogyakarta menandakan masih berlanjutnya perjuangan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Serangkaian perjuangan di meja perundingan telah menanti untuk dilaksanakan oleh para Pemimpin Republik Indonesia. Salah satu faktor pendorong pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta adalah reaksi dari dunia Internasional yang mengecam sikap arogan dari pihak Belanda yang diwujudkan dengan menyerang Indonesia melalui kekuatan senjata. Secara mengejutkan dunia Internasional tidak hanya sekedar mengecam, melainkan memberikan juga sumbangsuhnya bagi perjuangan Republik Indonesia, tentunya dengan jalan damai yaitu, meja perundingan.

BAB III

JALANNYA PERUNDINGAN DALAM KMB DAN PENGAKUAN KEDAULATAN TERHADAP RIS

A. Jalannya Perundingan dalam KMB

Setelah Konferensi Inter-Indonesia yang penuh toleransi dan saling pengertian, baik yang diadakan di Yogyakarta maupun di Jakarta serta sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri secara musyawarah di dalam konferensi Inter-Indonesia, bangsa Indonesia secara keseluruhan siap menghadapi KMB.

Sebagai hasil dari perundingan antara delegasi Republik Indonesia, delegasi BFO, dan delegasi Belanda, maka pada tanggal 22 Juni 1949 telah didapat persesuaian pendapat (*meeting of Minds*) mengenai Konferensi Meja Bundar yang dicantumkan dalam sebuah memorandum.

Pada tanggal 4 Agustus 1949 pihak Republik Indonesia telah berhasil menetapkan wakil-wakilnya dalam KMB, dan tanggal 4 Agustus 1949 itu pula diadakan perubahan pada bentuk kabinet Republik Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara diangkat menjadi wakil perdana menteri berkedudukan di Sumatera dan Sultan Hamengkubuwono menjadi menteri Pertahanan merangkap sebagai wakil perdana menteri selama Moh. Hatta memimpin delegasi Indonesia di KMB.⁸⁰

⁸⁰ K. M. L. Tobing, 1987: *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia (KMB)*, CV. Haji Masagung, Jakarta, hlm. 196.

Konferensi Meja Bundar yang menurut rencana akan diadakan pada tanggal 3 Agustus 1949 ternyata baru dapat diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di S'gravemhage, Den Haag, Belanda. Pembukaan konferensi itu dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda Drees selaku ketua konferensi. Dalam konferensi itu Pemerintah Republik mengirimkan delegasinya yang terdiri dari : Moh. Hatta sebagai ketua delegasi dan Moh. Roem sebagai wakilnya, sedangkan T. B. Simatupang, Supomo, J. Leimena, Djuanda, Sukiman Wirjosandjojo, dan Sumitro Djohadikusumo masing-masing sebagai anggota. Delegasi BFO diketuai Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung sebagai wakilnya. Delegasi Belanda diketuai oleh van Maarseveen dan wakilnya van Vredenburg.⁸¹ Di samping itu hadir pula delegasi dari UNCI yang mempunyai wewenang untuk memberi bantuan kepada pihak yang bersengketa dalam perundingan itu. Dari UNCI yang hadir ialah : T. K. Critchley, R. Hereman, dan Merle Cochran.

Untuk pelaksanaan konferensi itu disusun suatu komisi yang kemudian disebut Komisi Pusat, yang anggotanya ialah semua ketua delegasi dari ketiga negara itu dan semua anggota UNCI. Komisi pusat itu membawahi 5 komisi yaitu: Komisi Politik dan Konstitusional, Komisi Keuangan dan Ekonomi, Komisi Militer, Komisi Sosial, dan Komisi Kebudayaan. Komisi Politik dan Konstitusional dibagi menjadi beberapa subkomisi, yaitu : subkomisi urusan politik dan konstitusional, subkomisi urusan Uni Indonesia-Belanda dan Piagam Pengakuan Kedaulatan, subkomisi urusan hubungan dengan luar negeri. Dari ketiga subkomisi itu, khusus subkomisi politik dan konstitusional dibagi menjadi

⁸¹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1949: *Perjuangan di Konferensi Medja Bundar*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Yogyakarta, hlm. 10-13.

3 seksi yaitu : seksi mengenai konstitusi sementara RIS, seksi mengenai kebangsaan dan kewarganegaraan, dan seksi mengenai soal Irian Barat.

Beberapa hari setelah konferensi berlangsung suatu hal yang tidak dapat dihindari ialah timbulnya ketegangan dalam pembicaraan itu. Mula-mula ketegangan timbul dalam pembicaraan soal kerjasama antara RIS dengan Belanda. Dalam pembicaraan itu delegasi Belanda menafsirkan bahwa kerjasama antara RIS-Belanda nanti dikepalai oleh Ratu Belanda yang disebut Mahkota Uni. Mahkota Uni dijabat oleh Ratu Juliana secara turun-temurun. Delegasi RI dan BFO menolak usul itu, karena apabila diterima berarti Indonesia masuk dalam ikatan Kerajaan Belanda. Tetapi seandainya uni yang dikepalai Ratu Belanda itu ada, maka harus dipandang sebagai simbol saja dan tidak mempunyai fungsi dalam hukum internasional. Perdebatan mengenai soal Uni Indonesia-Belanda ini sampai tanggal 16 September 1949 belum dapat diselesaikan sehingga perundingan mengalami kemacetan.

Untuk mencegah kemacetan KMB, maka pada tanggal 17 September 1949 dibentuk panitia kecil yang beranggotakan van Rooyen, Moh. Roem, dan Ide Anak Agung Gde Agung. Panitia kecil ini mengadakan sidang di Namur, Belgia. Oleh karena perundingan itu mengalami kesulitan, maka akhirnya delegasi UNCI diundang. Delegasi UNCI yang kemudian hadir ialah Merle Cochran. Merle Cochran secara pribadi mengajukan usul kompromi yaitu bahwa Kepala Uni melambangkan dan menjelmakan kerjasama secara sukarela dan kekal antara sekutu-sekutu Uni. Pada tanggal 18 September 1949 kedua pihak menerima usul itu. Bagi Republik Indonesia dan BFO, rumusan itu sesuai dengan pendiriannya

karena dasarnya sukarela, sedang bagi Belanda, Uni rumusan Merle Cochran itu mengandung pengertian bahwa Belanda dapat mengawetkan dan mengekalkan kerjasama itu.

Di bidang ketatanegaraan dan politik ternyata tidak hanya soal Uni saja yang mengalami kesulitan dalam pembicaraan itu. Soal Irian Barat juga merupakan masalah yang memerlukan waktu lama penyelesaiannya. Delegasi Belanda dalam pembicaraan itu mengatakan bahwa Pemerintah Belanda tidak akan mengikutkan Irian Barat dalam pengakuan kedaulatan nanti. Sebaliknya delegasi RI maupun BFO tetap menuntut agar pengakuan kedaulatan nanti harus secara bulat tanpa syarat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Belanda merasa keberatan atas tuntutan delegasi RI dan BFO untuk menyerahkan Irian Barat kepada RIS dalam pengakuan kedaulatan nanti. Karena tuntutan itu maka delegasi Belanda mengancam akan mengundurkan diri dari KMB.⁸²

Pada tanggal 29 Oktober 1949 soal Irian Barat dibawa ke komisi Pusat untuk dirundingkan. Dalam perundingan itu yang hadir ialah van Maarseveen, Moh. Hatta, dan Sultan Hamid II. Dalam pembicaraan itu Hatta menyatakan bahwa Hindia Belanda selamanya diperintah sebagai satu kesatuan dan belum pernah didengar tentang pemisahan Irian Barat dari Hindia Belanda. Delegasi BFO pada prinsipnya sama pendapatnya dengan delegasi RI untuk menyerahkan Irian Barat dalam pengakuan kedaulatan nanti. Karena tuntutan delegasi RI

⁸² T. B. Simatupang, *op. cit.*, hlm. 179.

maupun BFO belum sesuai dengan prinsip Pemerintah Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada RIS dalam pengakuan kedaulatan nanti, maka ketua delegasi Belanda van Maarseveen menyatakan bahwa perundingan mengalami kemacetan.⁸³

Pada waktu perundingan mengalami kemacetan, maka delegasi dari UNCI menawarkan usul kompromi yaitu agar status Irian Barat tetap berada di bawah Pemerintah Belanda dengan syarat bahwa setelah berakhir tahun pertama dari saat pengakuan kedaulatan kepada RIS status Irian Barat harus dirundingkan lagi antara RIS dengan Belanda. Pihak yang bersengketa baik dari RI, BFO maupun Belanda belum mau menerima usul kompromi itu, sehingga perundingan mengalami kemacetan lagi.

Pada tanggal 31 Oktober 1949 seksi mengenai Irian Barat mengadakan rapat lagi, yang dihadiri oleh delegasi RI, BFO, dan Belanda serta seorang anggota UNCI. Pada rapat itu ketiga delegasi mencapai kata sepakat untuk menerima usul kompromi dari UNCI yaitu Irian Barat harus diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Delegasi BFO mula-mula tidak menyetujui usul delegasi UNCI itu, tetapi setelah mendapat penjelasan dari ketua delegasi RI Moh. Hatta maka BFO mau menerima juga usul UNCI itu. Dengan diterimanya usul dari UNCI oleh ketiga delegasi itu maka soal Irian Barat dianggap sudah selesai.

Seksi lain yang masih termasuk subkomisi ketatanegaraan, politik, dan konstitusional ialah seksi mengenai konstitusi RIS. Rapat mengenai konstitusi RIS dapat berjalan lancar, karena sudah disiapkan lebih dulu pada waktu diadakan

⁸³ *Ibid.*, hal. 201.

konferensi antara RI-BFO pada tanggal 22 Juli-2 Agustus 1949 di Yogyakarta dan Jakarta. Pembicaraan mengenai konstitusi RIS tidak diadakan dalam rapat KMB, melainkan di luar KMB yang hanya dihadiri oleh delegasi BFO dan RI, sedangkan delegasi Belanda hanya diberi tahu hasilnya. Konstitusi itu disetujui oleh delegasi BFO dan RI pada tanggal 29 Oktober 1949 di Scheveningen, yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 1949 dibawa ke Komisi Pusat KMB.⁸⁴ Konstitusi itu ditandatangani oleh tiap-tiap utusan dari negara-negara bagian dari RI. Para penanda tangan itu ialah : Moh. Hatta dari RI, Ide Anak Agung Gde Agung dari Indonesia Timur, Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, A. P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur, Wiriaatmadja dari Pasundan, Mohammad Apan dari Riau, Abdoel Malik dari Sumatera Selatan, Kaliamsjah Sinaga dari Sumatera Timur, Soeparno dari Madura, A. A. Rivai dari Banjar, Saleh Ahmad dari Bangka, K. A. M. Joesoef dari Belitung, M. Ali dari Jawa Timur dan M. Jamani dari Kalimantan Tenggara.⁸⁵

Di samping persoalan mengenai ketatanegaraan, politik dan hukum, pembicaraan lain mengalami kesulitan ialah masalah keuangan. Kesulitan itu dikarenakan oleh perbedaan pendapat antara delegasi RI dan delegasi Belanda mengenai masalah hutang-piutang. Dalam pembicaraan mengenai utang-piutang itu delegasi Belanda menyatakan bahwa Pemerintahan RIS nanti harus mengembalikan hutang Belanda sebanyak 6,1 milyar gulden kepada Pemerintah Belanda. Hutang itu bagi delegasi RI terlalu berat, karenanya delegasi RI

⁸⁴ Mohammad Yamin, 1960: *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Djakarta, hlm. 12-13.

⁸⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: *Dari Negara Indoneia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 632.

menolak tuntutan itu. Dalam jawabannya delegasi RI mengatakan bahwa sebenarnya Pemerintah RIS tidak perlu membayar hutang Hindia Belanda, karena Pemerintah RI sudah ada sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam hal itu Pemerintah Belanda justru harus mengakui kemerdekaan RI. Sebaliknya delegasi Belanda mengatakan bahwa Pemerintah Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan RI, karena itu tetap menuntut agar Pemerintah RIS nanti harus membayar hutang Hindia Belanda. Pembicaraan mengenai hutang itu sampai akhir bulan September 1949 belum dapat diselesaikan.⁸⁶

Untuk mengatasi kemacetan maka dibentuklah panitia kecil yang anggotanya terdiri dari 3 orang, seorang wakil dari RI, seorang wakil Belanda, dan seorang wakil UNCI.⁸⁷ Panitia itu mengadakan rapat di Baarn pada tanggal 2 Oktober 1949. Walaupun di bawah UNCI perundingan itu juga belum dapat mencari jalan keluar. Pada pokoknya delegasi RI mau menerima tuntutan Belanda untuk membayar hutang Hindia Belanda asal terbatas pada hutang yang dahulu dipakai untuk kepentingan Indonesia, sedang hutang yang dipakai untuk membiayai aksi militer Belanda, delegasi RI tetap menolak. Karena belum ada kecocokan pendapat dari kedua pihak maka delegasi RI mengusulkan agar pembicaraan ditunda. Delegasi Belanda tidak mau menerima tawaran itu, dan mendesak agar masalah hutang Hindia Belanda dibicarakan dahulu, setelah itu baru pengakuan kedaulatan. Kedua pihak tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing, sehingga pembicaraan mengalami jalan buntu.

⁸⁶ Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 292-294.

⁸⁷ Notosoetardjo, *op. cit.*, hlm. 176.

Kedua pihak menyadari kalau soal hutang itu belum terselesaikan maka KMB akan mengalami kegagalan. Untuk mengatasi persoalan itu maka dibentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan : H. Djuanda dari RI, Inderakusuma dari BFO, Hirschfelt dari Belanda, serta Merle Cochran dari UNCI. Panitia kecil ini pada tanggal 24 Oktober 1949 mengadakan sidang di Hoge Veluwe. Merle Cochran secara giat berusaha menerobos kemacetan itu, dengan menekan kedua pihak agar mau menerima usul Merle Cochran. Merle Cochran berhasil mendekatkan pendirian kedua pihak yang akhirnya dapat menghasilkan suatu persetujuan. Persetujuan itu menyebutkan bahwa RIS akan mengambil oper hutang Hindia Belanda sejumlah 4300 juta gulden, dari tuntutan Pemerintah Belanda sejumlah 6100 juta gulden, yang terdiri dari hutang dalam negeri 3000 juta gulden, dan hutang luar negeri 3100 juta gulden.⁸⁸

Dengan selesainya pembicaraan mengenai hutang yang harus dibayar negara RIS nanti kepada Pemerintah Hindia Belanda, maka dihasilkan suatu persetujuan di mana hutang yang harus ditanggung oleh negara RIS nanti telah dihapuskan sejumlah 2 milyar gulden. Menurut pasal 25 dalam KMB, hutang-hutang yang menjadi tanggungan negara RIS dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :⁸⁹

1. Mengenai hutang defisit Hindia Belanda pada masa sesudah perang.
2. Mengenai hutang kepada negara ketiga.
3. Mengenai hutang kepada Kerajaan Belanda.
4. Mengenai hutang pada saat penyerahan kedaulatan.

⁸⁸ G. McT. Kahin, *op. cit.*, hlm. 439-441.

⁸⁹ Notosoetardjo, *op. cit.*, hlm. 279.

Di samping masalah hutang, komisi Ekonomi dan Keuangan juga berhasil mencapai persetujuan tentang pemindahan uang dari RIS ke Negeri Belanda untuk kepentingan perusahaan Belanda, misalnya, bunga dan pengangsuran pinjaman, iuran untuk dana dan jaminan sosial bagi para pegawai Belanda dan pembayaran lain-lainnya.

Komisi lain, misalnya Komisi Militer mula-mula mengalami kesulitan dalam pembicaraan masalah militer itu. Kesulitan itu dikarenakan oleh perbedaan pendapat mengenai kapal perang Belanda di Indonesia. Belanda menghendaki agar kapal perang Belanda ditarik ke negaranya, sedangkan RI menghendaki agar kapal perang Belanda diserahkan kepada Pemerintah RIS. Pembicaraan itu akhirnya mengeluarkan suatu keputusan yang meliputi : tentara Belanda atau *Koninklijk Leger* (KL) akan ditarik dari Indonesia setelah penyerahan kedaulatan, sementara menunggu pengangkutan ke Negeri Belanda dilarang mengadakan operasi militer terkecuali atas permintaan Pemerintah RIS. Setelah penyerahan kedaulatan, maka RIS bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Anggota angkatan perang yang disebut tentara Hindia Belanda atau *Koninklijk Nederlands Indische leger* (KNIL) dan batalyon-batalyon federal akan ditampung dalam Angkatan Perang RIS (APRIS).

Untuk komisi kebudayaan, ketiga delegasi dalam KMB berhasil mencapai kata sepakat bahwa hubungan kebudayaan pengaturannya atas dasar sukarela dan bersifat timbal balik, dalam arti bahwa hubungan itu saling menguntungkan. Ketiga pihak juga menyetujui diadakannya tukar-menukar para guru besar

maupun para ahli untuk memajukan ilmu pengetahuan. Di samping itu disetujui pula agar benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan budaya dikembalikan kepada Pemerintahan RIS.

Dalam komisi sosial persetujuan yang tercapai ialah status para pegawai Belanda setelah pengakuan kedaulatan. Pemerintah RIS pada dasarnya mau menerima para pegawai Belanda pada saat pengakuan kedaulatan sampai selama dua tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pemerintah RIS tidak akan mengeluarkan peraturan yang merugikan para pegawai Pemerintahan RIS yang berkebangsaan Belanda.⁹⁰

Pada tanggal 31 oktober 1949 semua pasal yang telah dirumuskan dalam perundingan disepakati bersama oleh ketiga delegasi kecuali soal Irian Barat. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1949 Komisi Pusat mengadakan rapat. Rapat itu memutuskan bahwa semua hasil KMB dituang ke dalam resolusi induk, yang terdiri dari :⁹¹

1. Rencana Piagam Penyerahan Kedaulatan.
2. Rencana Peraturan Dasar Uni dan lampiran-lampirannya.
3. Persetujuan khusus dan persetujuan peralihan mengenai kedudukan pegawai sipil.
4. Kerjasama di lapangan militer.

Resolusi induk itu kemudian ditandatangani oleh ketua delegasi Belanda van Maarseveen, ketua delegasi RI Moh. Hatta, dan ketua delegasi BFO Sultan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 314.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 311.

Hamid II pada tanggal 2 November 1949. Ikut pula menandatangani resolusi induk itu dari UNCI R. Hereman (ketua), dan Merle Cochran serta Critchley (anggota). Setelah disetujui oleh ketiga delegasi maka resolusi induk itu kemudian disahkan oleh Perdana Menteri Belanda Drees selaku ketua KMB. Dengan disahkannya resolusi induk itu, maka KMB ditutup oleh Perdana Menteri Belanda Drees.

B. Pengakuan Kedaulatan terhadap RIS

Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar. Memang terbukti kemudian bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia di dalam usahanya untuk mengisi kemerdekaan.

Hasil dari KMB ternyata awal dari lahirnya masalah-masalah baru yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Hasil KMB membawa dampak politik dan militer yang kurang menguntungkan bagi perkembangan Bangsa Indonesia lebih lanjut. Pemberontakan di daerah dan masalah Irian Barat yang belum tuntas dalam penyelesaiannya menjadikan hasil KMB bukan hasil terbaik dalam penyelesaian masalah Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Setelah Konferensi Meja Bundar selesai, untuk selanjutnya maka ketua delegasi RI Moh. Hatta pergi ke Yogyakarta guna mengadakan perundingan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengenai hasil KMB. Pembicaraan mula-mula diadakan pada tanggal 6 Desember 1949 di Yogyakarta.

Pada pembicaraan itu Moh. Hatta berusaha meyakinkan bahwa kedaulatan yang diakui Pemerintah Belanda nanti adalah lengkap dan penuh. Lengkap, maksudnya ialah bahwa Negara Indonesia hasil KMB mempunyai Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar itu juga berdasar Pancasila. Sedangkan penuh maksudnya ialah bahwa pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia tanpa syarat.⁹²

Sidang KNIP baru dapat mengeluarkan keputusan pembicaraan hasil KMB pada tanggal 14 Desember 1949 setelah melalui pemungutan suara terlebih dahulu. Pada sidang itu terjadi pembicaraan yang cukup menegangkan antara yang menyetujui dan menolak hasil KMB. Asraruddin dari Partai Buruh, Subagio dari Partai Sosialis Indonesia, dan Sigit non partai meninggalkan sidang yang kemudian diikuti anggota lain yang keseluruhannya berjumlah 31 orang. Namun pada siang harinya pukul 11.00 KNIP dapat mengumumkan hasil pemungutan suara, yaitu 226 manerima hasil KMB, 62 menolak, dan 31 orang tidak mengeluarkan suara. Dengan diterimanya hasil KMB oleh KNIP maka RIS akan segera berdiri untuk menggantikan negara RI.⁹³

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan Sidang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Sukarno dan Moh. Hatta. Pemilihan dilakukan oleh Dewan Pemilihan presiden RIS yang beranggotakan wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil negara/daerah bagian. Esoknya pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Sukarno dan Moh. Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS. Pelantikan dilakukan pada tanggal 16 Desember 1949

⁹² Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, *op. cit.*, hlm. 222.

⁹³ K. M. L. Tobing, *op. cit.*, hlm. 232.

bertempat di Kraton Yogyakarta.⁹⁴

Bersamaan dengan pembentukan Kabinet RIS itu, terbentuk pula Kabinet RI di bawah Perdana Menteri A. Halim. Dalam Negara RI tidak diadakan pemilihan Presiden baru, melainkan diangkat Pejabat Presiden, yaitu Mr. Assaat yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 17 Desember 1949.

Dengan terbentuknya Kabinet RIS maka pada tanggal 21 Desember 1949 segera disusun suatu delegasi untuk menghadiri upacara pengakuan kedaulatan di Amsterdam. Delegasi RIS yang terbentuk terdiri dari : Moh. Hatta sebagai ketua delegasi dan Ali Sastroamodjojo sebagai wakil ketua delegasi. Anggotanya terdiri dari Moh. Roem, Supomo, Sukiman Wirjosandjojo, Sultan Hamid II, dan Sujono Hadinoto. Upacara pengakuan kedaulatan itu dilakukan dengan penandatanganan Akta Penyerahan dan Piagam Pengakuan Kedaulatan oleh Ratu Juliana dalam sebuah upacara protokol di Istana Kerajaan “Het Paleis op de Dam” di Amsterdam pada tanggal 27 Desember pukul 10.17. Piagam Pengakuan Kedaulatan itu juga ditandatangani oleh semua menteri Belanda dan para delegasi RIS yang terpenting Hatta, Supomo, Sultan Hamid II, dan Suparno.⁹⁵

Di Jakarta pada hari yang sama juga dilakukan upacara pengakuan kedaulatan dari Wakil Tinggi Belanda A. H. J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dengan penurunan bendera Belanda yang digantikan dengan pengibaran bendera RIS serta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah pengakuan kedaulatan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 1949 Presiden Soekarno tiba di

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 245.

⁹⁵ K. M. L. Tobing, *op. cit.*, hlm. 235.

Jakarta untuk memangku jabatannya. Dengan kedatangan Presiden Sukarno maka dimulailah Pemerintahan RIS di Jakarta yang menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara RIS hasil KMB itu terdiri dari 16 negara bagian.⁹⁶

Upacara pengakuan kedaulatan ini mengakhiri suatu periode dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, yang telah menelan sekian banyak jiwa dan harta benda rakyat Indonesia.

Konferensi Meja Bundar (KMB) memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, karena KMB bisa dikatakan sebagai dasar dari pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Hasil akhir dari KMB memberikan keuntungan bagi pihak Republik Indonesia. KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tidak bisa dikatakan berjalan lancar, karena banyak mengalami kemacetan. KMB yang banyak mengalami kemacetan itu, mempunyai nilai plus juga bahwa KMB itu sendiri berhasil diselesaikan pelaksanaannya.

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 251.

BAB IV

DAMPAK POLITIK DAN MILITER TERHADAP RIS SETELAH PENGAKUAN KEDAULATAN

A. Dampak Politik dan Militer Terhadap RIS

Dengan hasil KMB di mana pihak Republik Indonesia mendapatkan kemenangan secara mutlak, rupanya berbagai kalangan di pihak Belanda merasa sangat kecewa dan bahkan secara moril terpukul serta mendendam untuk melakukan pembalasan. Hasil dari KMB itu sebenarnya dapat dikatakan sebagai bom waktu peninggalan Belanda.⁹⁷

Pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS merupakan awal tercapainya penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda yang sekaligus merupakan awal pelaksanaan Pemerintahan RIS. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah RIS mempunyai 6 program utama yang akan direalisasikan yaitu :⁹⁸

1. Mempercepat pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia.
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) serta pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang secepat mungkin.
3. Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, perumahan, perhubungan,

⁹⁷ Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 94.

⁹⁸ Kementerian Penerangan, Kabinet-Kabinet RI, *op. cit.*, hlm. 51-52.

kesehatan, serta mengadakan peraturan tentang upah minimum dan lain-lainnya.

4. Menyempurnakan perguruan tinggi dan pembangunan pusat-pusat kebudayaan.
5. Menjalankan politik luar negeri yang dapat memperkuat kedudukan RIS.
6. Menyelenggarakan ketenteraman umum demi tercapainya hak-hak demokrasi.

Mengenai poin kedua di atas mengenai tugas Kabinet RIS, persetujuan di bidang militer dari KMB menjadi dasar bagi Kabinet RIS dalam melaksanakan tugasnya di bidang militer. Kabinet RIS akan melakukan pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya, pembubaran KNIL, dan pemasukan bekas anggota KNIL secara perorangan ke dalam APRIS. Pembentukan APRIS ini kemudian diatur dengan Undang-undang Darurat nomor 4 Tahun 1950. Pasal 1 dari Undang-undang tersebut menyebutkan :⁹⁹

“ Yang dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ialah Warga Negara Republik Indonesia Serikat bekas anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Indonesia Serikat bekas anggota Angkatan Darat, yang disusun oleh atau dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan Warga Negara bekas anggota Angkatan Laut Kerajaan Belanda “.

Pada masa awal pemerintahan RIS tampak ada kecendrungan di kalangan sementara golongan untuk mengadakan demonstrasi sebagai pernyataan rasa tidak senang terhadap bentuk negara serikat di Indonesia. Para demonstran itu menuntut pembubaran negara bagian yang bersangkutan dan ingin menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia (RI). Kasus itu dapat dilihat di beberapa negara

⁹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 19.

bagian, antara lain : di Jawa Timur pada bulan Januari 1950 terjadi demonstrasi yang menghendaki pembubaran Negara Jawa Timur. Tuntutan pembubaran Negara Jawa Timur itu sebenarnya telah terjadi beberapa hari sebelum pengakuan kedaulatan, yaitu pada tanggal 22 Desember 1949 dengan dikeluarkannya suatu resolusi yang ditandatangani oleh Sujarwo dan Sujono di Trowulan yang ditujukan kepada Wali Negara Jawa Timur dan Ketua Parlemen Jawa Timur. Isi resolusi itu ialah tuntutan pembubaran Negara Jawa Timur dan pengembalian Jawa Timur kepada Pemerintah RI.¹⁰⁰ Dengan timbulnya gejolak seperti itu maka akhirnya Ketua Parlemen Jawa Timur R. Juwito mengumumkan pembubaran Negara Jawa Timur pada tanggal 25 Februari 1950. Dengan bubarnya Negara Jawa Timur maka R. T. Achmad Kusumonegoro harus turun tahta sebagai wali negara itu.

Kasus serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan, yang menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur dan menghendaki penggabungan dengan negara RI. Kota-kota yang dilanda demonstrasi itu ialah: Jeneponto, Pare-pare, dan Ujung Pandang. Demonstrasi mencapai puncaknya pada tanggal 17 Maret 1950 ketika ketua delegasi A. N. Hajarati menyerahkan surat tuntutan pembubaran kepada Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur Husein Puang Limboro.¹⁰¹

Di Negara Sumatera Selatan (NSS) terjadi insiden kecil, yaitu adanya penurunan bendera NSS yang berwarna kuning hijau dan kemudian sebagai gantinya bendera Merah Putih dikibarkan. Peristiwa itu terjadi pada awal bulan Maret 1950 saat Perdana Menteri RIS Moh. Hatta mengunjungi NSS di

¹⁰⁰ Radik Utoyo Sudiro, 1976: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950*, CV Alda, Jakarta, hlm. 335.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 354.

Palembang. Karena Wali Negara Sumatera Selatan tidak cukup kuat untuk menghadapi para pemuda yang berdemonstrasi, maka akhirnya pada tanggal 18 Maret 1950 Abdul Malik sebagai wali negara NSS menyerahkan mandatnya kepada gubernur Moha mmad Isa.¹⁰²

Di samping munculnya gerakan yang menghendaki pembubaran negara bagian, muncul pula gerakan yang berusaha mempertahankan kelangsungan negara bagian. Gerakan itu pada dasarnya merupakan perintang Pemerintah RIS dalam melaksanakan tugasnya. Gerakan yang mula-mula timbul ialah yang menamakan dirinya Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat APRA. Gerakan APRA memberi ultimatum kepada Pemerintah RIS dan Negara Pasundan yang maksudnya agar anggota APRA mendapat pengakuan sebagai tentara Pasundan. Di samping itu gerakan APRA juga menolak pembubaran Negara Pasundan. Karena Pemerintah RIS maupun Negara Pasundan tidak memberi tanggapan terhadap ultimatum itu, maka pada tanggal 23 Januari 1950 gerakan APRA melancarkan serangan terhadap kota Bandung di bawah pimpinan Kapten Westerling dengan kekuatan 800 orang bekas KNIL. Serangan itu merupakan tindakan awal "*coup d' etat*" dari APRA.¹⁰³

Sasaran pokok serangan gerakan APRA ialah Markas Divisi Siliwangi yang pada waktu itu mendapat penjagaan 15 orang Angkatan Perang RIS (APRIS) yang akhirnya semua tewas karena serangan itu. Beberapa saat kemudian seorang perwira APRIS Letnan Kolonel Lembong dan seorang ajudannya tertembak mati ketika akan memasuki Markas Divisi Siliwangi. Tiadanya perlawanan dari pihak

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 357.

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981: *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, Tanpa Nama Penerbit, Jakarta, hlm. 24.

APRIS disebabkan serbuan itu dilakukan secara tiba-tiba. Untuk mengatasi persoalan itu maka Pemerintah RIS mengirimkan bantuannya yaitu kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pada waktu itu memang sedang berada di Jakarta.¹⁰⁴ Di Jakarta juga segera dilakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS Moh. Hatta dengan komisaris Tinggi Belanda A. H. J. Lovink dengan hasil, Mayor Jenderal Engel, Panglima tentara Belanda di Indonesia, akan mengusir Westerling ke luar Bandung.¹⁰⁵

Setelah Westerling pergi dari Bandung maka anggota APRA menyebar ke berbagai tempat untuk melarikan diri, tetapi APRIS terus mengadakan pengejaran dan terjadilah pertempuran antara APRIS dengan sisa-sisa gerakan APRA di daerah Pacet pada tanggal 24 Januari 1950. Dalam pertempuran itu sisa-sisa gerakan APRA dapat dihancurkan. Selama pertempuran dengan gerakan APRA, APRIS telah kehilangan 79 tentara karena tewas.¹⁰⁶

Selain mengancam kota Bandung gerakan APRA juga akan mengadakan rencana pembunuhan terhadap para menteri RIS yang sedang bersidang di Pejambon (Jakarta) pada tanggal 24 Januari 1950 pukul 17.00. Target utama dari pembunuhan itu ialah : Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Kepala Staf Angkatan Perang T. B. Simatupang, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Ali Budiarto. Rencana pembunuhan itu dapat digagalkan karena kesiagaan dari APRIS.¹⁰⁷

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰⁵ Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, *op. cit.*, hlm. 75.

¹⁰⁶ Persadja, 1953: *Proses Peristiwa Sultan Hamid II*, Tanpa Nama Penerbit, Jakarta, hlm. 172.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

Penyerbuan APRA di kota Bandung maupun rencana pembunuhan terhadap para menteri yang bersidang di Jakarta ternyata merupakan kerjasama antara Sultan Hamid II dengan Westerling.¹⁰⁸ Penyerbuan yang akan dilakukan di Jakarta terhadap para menteri itu berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Sultan Hamid II kepada Westerling dengan sebuah denah tentang letak duduk para menteri masing-masing.

Gerakan lain yang bertujuan menentang Pemerintah RIS ialah yang dilakukan oleh Kapten Andi Aziz di Ujung Pandang pada tanggal 5 April 1950. Andi Aziz sebelumnya ialah perwira KNIL yang kemudian bersama dengan anggota KNIL lain di bawah komandonya menggabungkan diri dengan APRIS pada tanggal 30 Maret 1950. Pada tanggal 5 April 1950 terdengar desas-desus bahwa Pemerintah RIS akan mendaratkan tentaranya di Sulawesi Selatan guna menjaga keamanan karena timbulnya beberapa demonstrasi baik dari kalangan yang anti RI maupun dari kalangan yang mendukung Negara Kesatuan RI. Desas-desus yang didengar oleh Andi Aziz tentang pengiriman APRIS ke Sulawesi Selatan itu menimbulkan rasa khawatir bagi bekas anggota KNIL termasuk Andi Aziz sendiri. Karena para bekas KNIL itu takut terdesak oleh kedatangan APRIS di Sulawesi Selatan itu, maka pada tanggal 5 April 1950 Andi Aziz beserta tentara di bawah komandonya menyerbu markas APRIS di Ujung Pandang. Melalui penyerbuan itu para pemberontak berhasil menguasai Sulawesi Selatan.¹⁰⁹

Pada dasarnya, Kapten Andi Aziz berbuat demikian untuk mempertahankan hidup NIT. Sejumlah politisi telah memperingatkan Andi Aziz

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁰⁹ Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, op. cit.*, hlm. 75-76.

untuk tidak menentang pusat, tetapi peringatan itu tidak didengar oleh Andi Aziz. Perbuatan Andi Aziz yang menyerbu markas APRIS itu ternyata menimbulkan kemarahan dari Presiden Sukarno. Presiden Sukarno pada tanggal 13 April 1950 memutuskan bahwa Andi Aziz sebagai pemberontak.¹¹⁰

Tentara APRIS yang berjumlah 900 orang di bawah pimpinan Mayor Worang yang dikirim ke Sulawesi Selatan beberapa hari sebelum meletusnya pemberontakan Andi Aziz, terpaksa tidak dapat mendarat di Ujung Pandang karena dihalau oleh tentara pemberontak, sehingga pendaratan tentara APRIS dilakukan di Jenepeto sebelah selatan Ujung Pandang. Tujuan Andi Aziz memimpin pemberontakan itu ialah menuntut kepada Pemerintah RIS agar Negara Indonesia Timur tidak dibubarkan. Di samping itu Andi Aziz juga mengajukan tuntutan agar pemeliharaan keamanan di NIT dilakukan oleh KNIL saja.

Berhubung timbulnya pemberontakan Andi Aziz, maka Pemerintah RIS pada tanggal 8 April 1950 memberi ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang ke Jakarta selambat-lambatnya tanggal 13 April 1950. Tetapi Andi Aziz baru tiba di Jakarta pada tanggal 15 April 1950 sehingga ia ditangkap sebagai pemberontak untuk diadili.¹¹¹ Pada tanggal 26 April 1950 Pemerintah RIS mengirimkan tentaranya ke Sulawesi Selatan guna menjaga keamanan di daerah itu, di bawah pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang.¹¹²

Peristiwa lain yang berusaha merongrong Pemerintah RIS ialah yang terjadi di Ambon dengan adanya proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS)

¹¹⁰ G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20 jilid II, op. cit.*, hlm. 71.

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, op. cit.*, hlm. 35.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 35-36.

pada tanggal 25 April 1950 oleh Soumokil selaku Presiden RMS. Situasi di kota Ambon menjelang pengumuman berdirinya RMS sangat kacau karena adanya pertentangan antara golongan pendukung negara kesatuan dengan pendukung negara federal. Di samping itu juga dikarenakan adanya hasutan Belanda terhadap anggota KNIL yang ingin menggabungkan diri dengan APRIS. Belanda melalui hasutan itu mengatakan bahwa apabila bekas anggota KNIL masuk APRIS hari depannya menjadi tidak pasti. Karena hasutan itu para anggota KNIL menjadi bingung kemudian mengadakan keributan. Keributan itu antara lain terjadi pada tanggal 22 Februari 1950 yang dilakukan sekelompok pemuda Ambon yang berjumlah 50 orang dengan tambahan dari para anggota KNIL. Korban yang jatuh karena keributan itu 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 15 orang luka ringan. Pada hari berikutnya keributan itu meluas ke seluruh Maluku Selatan. Para anggota KNIL sering melakukan pemerasan terhadap penduduk sehingga menimbulkan rasa cemas di kalangan mereka.¹¹³

Pada tanggal 20 April 1950 golongan yang pro RI dalam Partai Kerakyatan di bawah pimpinan E.U. Pupela menganjurkan kepada Pemerintah NIT agar menyesuaikan diri dengan Pemerintah RIS di Jakarta. Pupella pada tanggal 24 April 1950 dalam parlemen juga menyatakan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi kepada Pemerintah NIT karena Kabinet Diapari dianggapnya merupakan kelanjutan dari Pemerintah Belanda sebelum perang. Sebagai contoh mengenai keadaan yang kacau di Maluku Selatan, akan tetapi Pemerintah NIT

¹¹³ J. A. Puar, 1950: *Peristiwa Republik Maluku Selatan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 15-16.

tidak berusaha untuk mengatasinya. Karena timbulnya oposisi maka Diapari meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri NIT pada tanggal 24 April 1950.

Pada hari berikutnya tanggal 25 April 1950 di Ambon diumumkan berdirinya RMS. Pengumuman berdirinya RMS itu membuat kesulitan bagi Pemerintah RIS yang baru saja menyelesaikan pemberontakan Andi Aziz. Untuk mengatasi persoalan itu maka Pemerintah RIS secara bijaksana mengirimkan delegasinya ke Ambon untuk mengadakan perundingan dengan para pemimpin RMS. Delegasi berangkat tanggal 26 April 1950 yang terdiri dari Dr. J. Leimena (Menteri Kesehatan RIS), Ir. Putuhena (Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RIS), A. M. Pellaupessy (Ketua Senat RIS). Rombongan tiba di Ujung Pandang pada tanggal 29 April 1950, namun Ir. Putuhena ditahan untuk dicalonkan menjadi Perdana Menteri NIT. Pencalonan itu diterimanya dan pada tanggal 30 April 1950 Putuhena dilantik menjadi Perdana Menteri NIT.¹¹⁴

Selanjutnya delegasi yang terdiri dari Johannes Leimena dan Pellaupessy meneruskan perjalanannya. Delegasi sampai di Teluk Ambon pada tanggal 30 April 1950, tetapi tidak dapat bertemu langsung dengan para pemimpin RMS. Para delegasi RIS hanya bertemu dengan Sjahbandar yang telah membawa surat dari RMS untuk disampaikan kepada delegasi RIS. Dalam surat itu dinyatakan bahwa sebelum mengadakan perundingan, Pemerintah RIS harus mengakui dulu RMS. Johannes Leimena dalam surat jawabannya menyatakan bahwa ia datang

¹¹⁴ Richard Z. Leiriza, 1975: *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 177-178.

bukan sebagai utusan Pemerintah RIS tetapi sebagai putera daerah, karena itu maka delegasi RIS tidak mau menerima Pemerintahan RMS.¹¹⁵

Setelah usaha penyelesaian mengenai RMS secara damai yang dilakukan Pemerintah RIS tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah RIS memutuskan untuk segera menumpasnya dengan kekuatan senjata. Sebagai pelaksanaannya dibentuk sebuah pasukan ekspedisi yang terdiri dari batalyon-batalyon Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya. Dalam penumpasan itu tongkat komando diemban lagi oleh Kolonel A. E. Kawilarang.¹¹⁶

Pasukan APRIS yang dipimpin oleh Kolonel A. E. Kawilarang pada tanggal 14 Juli 1950 memulai serbuannya dengan pendaratan di Pulau Buru, kemudian dilanjutkan dengan pendaratan di Pulau Seram dan akhirnya baru ke Pulau Ambon. Dengan susah payah karena belum mengenal medannya, pasukan APRIS berhasil merebut pos-pos penting di Pulau Buru. Setelah Pulau Buru dapat dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju Seram. Sementara itu pasukan APRIS yang lain mendarat dan dapat dengan segera menguasai Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru.

RMS ternyata memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon di Maluku Tengah. Gerakan pasuka-pasukan APRIS di Seram mengalami kesulitan dan banyak minta korban. Setelah Seram dapat dikuasai, gerakan selanjutnya diarahkan ke Ambon yang menjadi pusat kedudukan RMS.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 179-180.

¹¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, *op. cit.*, hlm. 38.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 38-39.

Setelah bertempur selama 4 bulan sejak pendaratan pertama di Pulau Buru, akhirnya RMS tidak dapat bertahan lagi di Pulau Ambon sebagai pusat kekuatannya. Dalam pertempuran jarak dekat pasukan APRIS berhasil merebut benteng Nieuw Victoria. Keberhasilan pasukan APRIS itu ternyata harus dibayar mahal dengan gugurnya Letnan Kolonel Slamet Rijadi dan Letkol Sudiarto dalam pertempuran dengan kelompok RMS.¹¹⁸

Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pasukan Pemerintah RIS, sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri ke dalam hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan pengacauan.

B. Pembubaran Negara RIS

Hanya dalam waktu 6 minggu nasib RIS sebagai yang ditentukan oleh KMB tidak diganggu gugat. Sesudah itu tuntutan rakyat di daerah-daerah datang bertubi-tubi melalui rapat-rapat umum dan demonstrasi untuk pembubaran negara-negara bagian ciptaan Belanda. Suara-suara yang semakin lama semakin santer dari rakyat itu tentunya menghendaki kembali ke NKRI.

Banyak peninjau asing menganggap perubahan ke NKRI sebagai suatu hal yang tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi menurut Prof. G. McT. Kahin dari Amerika Serikat (yang sangat bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia) kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu hal yang wajar dan sehat, jika RIS dibiarkan hidup terus secara politis dan sosial psikologis bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat.¹¹⁹

¹¹⁸ Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 96-97.

¹¹⁹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20 Jilid II, op. cit.*, hlm. 69.

Pada saat menghadapi pemberontakan RMS, Pemerintah RIS selama bulan April itu sedang sibuk membicarakan pembentukan Negara Kesatuan RI. Beberapa negara bagian pada saat itu banyak yang sudah mengundurkan diri, dan sampai tanggal 5 April 1950 tinggal dua negara bagian yang masih ada yaitu Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur.¹²⁰ Negara Indonesia Timur merupakan satu-satunya negara bagian yang berusaha untuk mempertahankan bentuk negara federal. Para tokoh dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Nasional dalam parlemen NIT mengatakan bahwa penyelenggaraan ekonomi yang kuat dapat dilakukan apabila dengan *desentralisasi* kekuasaan yang luas. Berdasarkan *desentralisasi* kekuasaan maka daerah dapat mengatur daerahnya sendiri secara bebas sesuai dengan ciri khas penduduknya. Pendapat semacam itu bertentangan dengan ide atau cita-cita Negara RI yang menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan oleh pusat berdasar pada paham negara kesatuan. Namun demikian Pemerintahan RIS tetap berusaha agar NIT bersedia menggabungkan diri dengan negara RI.

Untuk mengajak Pemerintah NIT agar bersedia menggabungkan diri dengan RI, maka pada tanggal 9 April 1950 di Jakarta diadakan konferensi yang diikuti oleh Pemerintah RI, NIT, dan RIS. Dalam konferensi itu delegasi RIS diwakili oleh Ide Anak Agung Gde Agung dan Johannes Leimena. Delegasi RI diwakili oleh Perdana Menteri Abdul Halim dan Menteri Perhubungan Sitompul. Delegasi NIT diwakili oleh Letnan Kolonel Mokoginta, W. J. Ratulangi, Burhanuddin, S. Binol, Teng Ting Leng, Sahetapy Engel, dan Kapten Tahya.¹²¹

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 72-74.

¹²¹ *Harian Pedoman (Palembang)*, tanggal 12 April 1950.

Konferensi itu dibuka oleh Perdana Menteri RIS Moh Hatta pada tanggal 9 April 1950, yang kemudian pada tanggal 10 April 1950 menghasilkan beberapa keputusan, antara lain :¹²²

1. Persoalan ketatanegaraan NIT harus diselesaikan atas dasar semangat persatuan bangsa.
2. RI tidak mempunyai niat untuk melebur suatu pemerintah atau negara bagian tanpa persetujuan rakyat dari daerah itu.
3. Persoalan NIT akan ditentukan rakyatnya secara demokratis.

Sejak tercapainya persetujuan dalam konferensi itu ada suatu perkembangan di kalangan para tokoh politik yang memihak RI. Fraksi Progresif dalam parlemen NIT meningkatkan tuntutananya yaitu agar hasil yang telah dicapai di Jakarta pada konferensi itu disempurnakan dalam memasukkan NIT ke wilayah RI. Dalam perkembangan selanjutnya di NIT setelah kejatuhan Kabinet Diapari yang kemudian diganti oleh Putuhena pada tanggal 28 April 1950 Pemerintah NIT cenderung ingin menggabungkan diri dengan RI.¹²³ Untuk itu maka pada tanggal 10 Mei 1950 di Jakarta diadakan lagi konferensi antara RIS, NIT, dan RI. Pada pokoknya delegasi NIT menyatakan bahwa NIT sanggup meleburkan diri dan berusaha memasukkan NIT dalam wilayah RI. Keputusan konferensi itu mendapat persetujuan parlemen RIS maupun parlemen NIT. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1950 di Jakarta diadakan konferensi yang diikuti oleh RIS, NIT, dan NST di bawah pimpinan Perdana Menteri RIS Moh. Hatta. Dalam konferensi itu kedua Negara bagian yaitu NST dan NIT memberi

¹²² *Ibid.*, hlm. 78.

¹²³ Richard Z. Leirisa, *op. cit.*, hlm. 172-173.

kekuasaan penuh kepada Pemerintah RIS untuk mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah RI dalam rangka penggabungan kedua negara itu ke dalam Negara RI.¹²⁴

Perundingan selanjutnya antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI untuk membicarakan penggabungan kedua negara itu yang diadakan pada tanggal 19 Mei 1950, yang menghasilkan sebuah piagam persetujuan. Piagam persetujuan itu pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah RIS maupun RI sepakat untuk membentuk Negara kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 itu ditandatangani masing-masing oleh Moh. Hatta yang mewakili RIS dan Abdul Halim mewakili RI. Untuk melaksanakan Piagam Persetujuan RIS-RI dibentuk panitia bersama yang anggota-anggotanya terdiri dari kedua negara itu. Dari RIS sebagai ketua ialah Menteri Kehakiman Prof. Dr. Supomo dan sebagai anggota ialah Kosasih Purwanegara, Ir. Dakirman, Ir. Lobo, dan Mr. Tambunan. Delegasi RI diketuai oleh Perdana Menteri Abdul Hakim dengan anggotanya Hutomo, A.A. Suhardi, Djohan Sjahrusah, Harsoadi, Rustamadji, dan Rh. Kusnan.¹²⁵

Panitia bersama itu berhasil menyusun UUDS (50) yang dinamakan UUD Negara Kesatuan RI. Pada tanggal 11 Juli 1950 Rencana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI itu diajukan kepada Pemerintah RIS yang waktu itu sedang mengadakan sidang kabinet. Sidang yang dihadiri oleh Presiden Sukarno, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Menteri Perhubungan Herling

¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, *op. cit.*, hlm. 41

¹²⁵ Harsono Tjokroaminoto, 1951: *Menegakkan Benang Basah*, Bulan Bintang, Djakarta, hlm. 46.

Laoh menerima Rencana Undang-Undang Dasar itu. Begitu juga dengan KNIP, pada tanggal 12 Agustus 1950 menyetujui Rencana Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh panitia bersama itu. Parlemen dan Senat RIS baru menyetujui Rencana Undang-Undang Dasar itu pada tanggal 14 Agustus 1950.¹²⁶

Sementara itu dalam rangka pengambilalihan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan bangsa Indonesia, maka Pemerintah Belanda menyerahkan beberapa markas tentaranya kepada Pemerintah RIS. Penyerahan itu mula-mula dilakukan oleh angkatan udara Belanda pada tanggal 27 Juni 1950 di jalan Merdeka Barat oleh Jenderal van der Eem kepada komodor Suryadarma. Pada tanggal 25 Juli 1950 pimpinan tentara Belanda di Indonesia menyerahkan Markas Angkatan Darat kepada kepala Staf Angkatan Darat RIS Kolonel A. H. Nasution di Jalan Merdeka Utara. Markas Kepolisian baru diserahkan kepada Kepolisian RIS pada tanggal 15 Agustus 1950. Dengan penyerahan Markas Kepolisian Belanda itu maka di seluruh wilayah Indonesia penyelenggaraan keamanan dilakukan oleh Polisi RIS.¹²⁷

Selanjutnya perundingan untuk membicarakan pembentukan Negara Kesatuan RI diadakan pada tanggal 21 Juli 1950 antara RIS dan RI. Perundingan itu menghasilkan dan mengeluarkan beberapa keputusan, antara lain :¹²⁸

1. Dewan Perwakilan Rakyat akan terdiri dari para ketua, wakil ketua, dan anggota dari parlemen dan senat RIS, badan pekerja KNIP, dan Dewan Pertimbangan Agung.

¹²⁶ G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20 Jilid II, op. cit.*, hlm. 73.

¹²⁷ Radik Utoyo Sudiro, *op. cit.*, hlm. 375.

¹²⁸ *Harian Pedoman (Palembang)*, tanggal 22 Juli 1950.

2. Konstituante anggotanya dipilih dengan cara pemungutan suara berdasar 1 orang anggota untuk 150000 orang penduduk.
3. Dewan Menteri terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada kebijakan Pemerintah.
4. Sebelum Konstituante terbentuk, dalam negara RI diadakan jabatan wakil presiden yang akan dipegang oleh Moh. Hatta.
5. Ibu kota negara RI berkedudukan di Jakarta.

Perundingan itu juga menyetujui pembagian daerah Negara Kesatuan RI berdasarkan hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembagian itu meliputi Jawa dan Madura menjadi 3 daerah yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Sumatera terbagi menjadi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur, Kalimantan merupakan 1 Propinsi, sedang Indonesia Timur menjadi Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku.¹²⁹

Pada tanggal 15 Agustus 1950 UUDS (50) sudah bisa disahkan dan pada tanggal itu juga Presiden Sukarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan RI di depan rapat gabungan parlemen dan senat RIS. Pada saat itu pula Presiden Sukarno menuju ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari pemangku jabatan Presiden RI Mr. Assaat.¹³⁰ Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1950 para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilantik. Dengan demikian maka Negara RIS secara resmi bubar pada tanggal 15 Agustus 1950 pada saat Presiden Sukarno menerima kembali jabatannya sebagai Presiden

¹²⁹ *Ibid.*, tanggal 23 Juli 1950.

¹³⁰ *Ibid.*, tanggal 16 Agustus 1950.

RI. Namun demikian Kabinet RIS masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Kabinet RI pada tanggal 6 September 1950.¹³¹

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka selesailah taraf revolusi nasional kita karena dengan terbentuknya Negara RI terwujudlah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mendirikan negara kesatuan. Hanya Irian Barat (Irian Jaya) saja yang masih harus terus diperjuangkan lagi.¹³² Masalah Irian Barat ini nantinya menyebabkan terjadinya persengketaan untuk kesekian kalinya antara RI dan Belanda.

Salah satu hasil dari KMB, adalah pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah terbentuk Negara RIS, timbullah suatu dampak yang cukup dahsyat, terutama menuntut dibubarkannya Negara RIS dan ingin kembali lagi ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari dampak politik dan militer itu, adalah banyaknya rakyat yang kontra terhadap Negara RIS dibandingkan dengan yang pro. Atas dasar penolakan dari rakyat Indonesia terhadap bentuk Negara RIS, maka Negara RIS dibubarkan pada tanggal 15 Desember 1950.

¹³¹ *Ibid.*, tanggal 18 Agustus 1950.

¹³² G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20 Jilid II, op. cit.*, hlm. 74.

BAB V

KESIMPULAN

Perundingan yang dilakukan antara para pejuang kemerdekaan Indonesia dengan pihak Belanda, terutama Roem-Royeen Statement sangatlah membantu dalam usaha pembebasan para pemimpin Republik Indonesia. Terlepas dari segala perundingan itu, reaksi dunia Internasional sangatlah positif terhadap usaha pembebasan itu. Dunia Internasional, melalui PBB sangatlah mengecam tindakan pihak Belanda. Ada juga negara-negara yang bersimpati terhadap perjuangan Republik Indonesia memberikan bantuan dalam usaha pembebasan para pemimpin Republik Indonesia. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh negara-negara itu dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk dengan segera menyelesaikan masalah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Adapun negara-negara yang banyak membantu, adalah Australia, India, dan Amerika Serikat. Dengan banyaknya reaksi dari dunia Internasional yang mengecam tindakan Belanda itu, setidaknya memaksa Belanda untuk membebaskan para pemimpin Republik Indonesia dan mengembalikannya ke Yogyakarta. Pembebasan para pemimpin Republik Indonesia itu, ternyata membuka cakrawala baru dalam upaya memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia secara utuh.

KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda, tidak dapat dikatakan berjalan lancar. Pihak Belanda yang berkeinginan menguasai Indonesia kembali melalui KMB, banyak memberikan tekanan bagi pihak Republik Indonesia, sehingga jalannya KMB sering mengalami kemacetan. Kemacetan yang terjadi, sering kali

sangat sulit untuk diselesaikan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengatasinya. Perjuangan yang tidak mengenal lelah oleh para delegasi Indonesia dan juga dukungan dari BFO serta adanya penengah dari UNCI (PBB) merupakan salah satu kunci dari penyelesaian penyelenggaraan KMB. KMB yang banyak mengalami kemacetan, akhirnya dapat terselesaikan juga pelaksanaannya dengan hasil akhir terbentuknya Negara RIS.

Banyaknya penolakan dari rakyat Indonesia (rakyat negara bagian) terhadap Negara RIS, memunculkan suatu polemik baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tuntutan agar Negara RIS dibubarkan dan keinginan untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah terhadap bentuk Negara RIS. Pemerintah yang pada awalnya menerima bentuk Negara RIS, menjadi pesimis terhadap bentuk Negara RIS itu sendiri. Dampak politik dan militer yang begitu dahsyat dalam situasi yang krusial itu, membuka langkah dan memberi jalan bagi para pemimpin Negara RIS untuk segera membubarkan Negara RIS yang disinyalir sebagai buatan Belanda dan dengan segera mungkin mengembalikan amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Malik,
1979 *Mengabdi Republik*. Gunung Agung: Jakarta.
- Ali Sastroamidjojo,
1972 *Tonggak-tonggak Diperjalananku*. PT. Kinta: Jakarta.
- Aminuddin Junus,
1950 *Garis Politik Hatta*. Penabur: Bukit Tinggi.
- Badan Musyawarah MUSEA,
1985 *Yogya Benteng Proklamasi*. Baharmus: Jakarta.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad,
1994 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar harapan: Jakarta.
- Bardosono,
1954 *Peristiwa Sulawesi Selatan*. Jajasan Pustaka Militer: Djakarta.
- Basuki Suwarno,
1999 *Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950*. PAN Percetakan Upakara: Jakarta.
- Daska Prijadi,
1964 *Penumpasan "APRA" Westerling*. Tanpa Nama Penerbit: Bandung.
- Dinas Sejarah Militer Kodam VII Diponegoro,
1977 *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*. CV. Borobudur Megah: Semarang.
- Gottchlak, Louis,
1985 *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. UI Press: Jakarta.
- Hamid Algadri,
1991 *Suka Duka Masa Revolusi*. UI Press: Jakarta.
- Harsono Tjokroaminoto,
1951 *Menegakkan Benang Basah*. Bulan Bintang: Djakarta.
- Ide Anak Agung Gde Agung,
1983 *Renville*. Sinar Harapan: Jakarta.
-

1995 *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*. Sebelas Maret University Press: Surakarta.

1984 *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

1995 *Pernyataan Rum – Van Roijen (Rum-Van Roijen Statemant) 7 Mei 1949*. Yayasan Pustaka Utama: Jakarta.

Indra Muhammad Ridhwan dan Sophian Marthabaya,
1987 *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-10-1945*. Sinar Grafik: Jakarta.

Kahin, G. McT.,
1995 *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Terjemahan Nin Bakdi Soemanto. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Kansil, C. S. T.,
2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia,
1950 *Pemulihan Pemerintah RI*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia: Jogjakarta.

1949 *Perjuangan di Konperensi Medja Bundar*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia: Jogjakarta.

1949 *Berita KNIP*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia: Jogjakarta.

Kementerian Penerangan,
1957 *Kabinet-Kabinet RI*. Kementerian Penerangan: Djakarta.

Koentowijoyo,
1995 *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya: Yogyakarta.

Lapian, A. B. dan Droogler, P. J.,
1985 *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Lapian, A. B. Dkk,
1973 *Terminologi Sejarah (1945-1950) & (1950-1959)*. Depdikbud:

- Leiriza, Richard,
1975 *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. UI Press: Jakarta.
- Mavis Rose,
1991 *Biografi Politik Moh. Hatta*. P.T. Gramedia: Jakarta.
- Moedjanto, G.,
1989 *Indonesia Abad 20 Jilid I*. Kanisius: Yogyakarta.
- _____,
1989 *Indonesia Abad 20 Jilid II*. Kanisius: Yogyakarta.
- Moeliono, Anton,
1987 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Mohammad Hatta,
1967 *Mendayung Antara Dua Karang*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Mohammad Jamin,
1960 *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djambatan: Djakarta.
- Mohammad Roem,
1967 *Suka Duka Berunding dengan Belanda*. Jajasan Idaju: Djakarta.
- _____,
1989 *Diplomasi ; Ujung Tombak Perjuangan RI*. Gramedia: Jakarta.
- _____,
1972 *Bunga Rampai Dari Sejarah*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Nasution, A.H.,
1979 *Sekitar Perang Kemerdekaan: periode Renville*. Angkasa: Bandung.
- _____,
1979 *Sekitar Perang Kemerdekaan: Periode KMB*. Angkasa: Bandung.
- _____,
1966 *Sejarah Perjuangan di Bidang Bersenjata*. Mega Book Store: Jakarta.
- _____,
1965 *Pokok-Pokok Gerilja*. PT. Pembimbing Masa: Djakarta.

- Notosoetardjo,
1956 *Konperensi Medja Bundar (Dokumen)*. Endang: Jakarta.
- Nugroho Notosusanto,
1971 *Norma-Norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*. Dephankam:
Jakarta.
- Persadja,
1953 *Proses Peristiwa Sultan Hamid II*. Tanpa Nama Penerbit: Jakarta.
- Puar, J. A.,
1950 *Peristiwa Republik Maluku Selatan*. Bulan Bintang: Djakarta.
- Radik Utoyo Sudiro,
1976 *Album Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. CV. Alda: Jakarta.
- Ramadhan, K. H.,
1988 *A. E. Kawilarang Untuk Sang Merah Putih (Pengalaman 1942-1961)*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Riecklefs, M. C.,
2005 *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi: Jakarta.
- Rochmani Santoso,
1965 *Bom Waktu Kolonialis Belanda Meledak di Makasar*. Tanpa Nama Penerbit: Djakarta.
- Saleh A. Djamhari,
1967 *Markas Besar Komando Djawa 1948-1949*. Lembaga Sedjarah Hankam: Djakarta.
- Sartono Kartodirjo,
1975 *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*. Balai Pustaka: Jakarta.
-
- 1992 *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Gramedia: Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia,
1980 *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta.
-
- 1980 *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. Jakarta.
- Simatupang, T.B.,
1980 *Laporan Dari Banaran*. Sinar Harapan: Jakarta.

- Soejitno Hardjosoediro,
1987 *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*. Balai pustaka: Jakarta.
- Sri Endang Sumiyati, Dkk.,
2001 *Pelurusan Sejarah (Serangan Oemoem 1 Maret 1949)*. Media Presssindo: Yogyakarta.
- Subagio, I. N.,
1981 *Pejuang Tanpa Henti*. Gunung Agung: Jakarta.
- Sukanto,
1982 *Perjalanan Bersahaja Jenderal Besar Sudirman*. Pustaka militer: Jakarta.
- Suryo Sumarwoto,
1983 *Konflik RI-Belanda masa 1945-1948*. Undip: Semarang.
- Suwarno, P. J.,
2003 *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Tobing, K.M.L.,
1988 *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia (Renville)*. CV. Haji Masagung: Jakarta.
-
- 1987 *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia (KMB)*. CV. Haji Masagung: Jakarta.
- Tuk Setyohadi,
2002 *Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Rajawali Coorporation: Jakarta.
- Wolhoff, G. J.,
1954 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. NV. Timun Mas: Djakarta.
-
- 1990 *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cipta Adi Pustaka: Jakarta.

Surat Kabar,

Kedaulatan Rakyat, tanggal 24 Djanuari 1948.

_____, tanggal 9 April 1948.

_____, tanggal 16 April 1948.

_____, tanggal 25 April 1948.

_____, tanggal 9 Agustus 1948.

_____, tanggal 5 Nopember 1948.

Pedoman (Palembang), tanggal 12 April 1950.

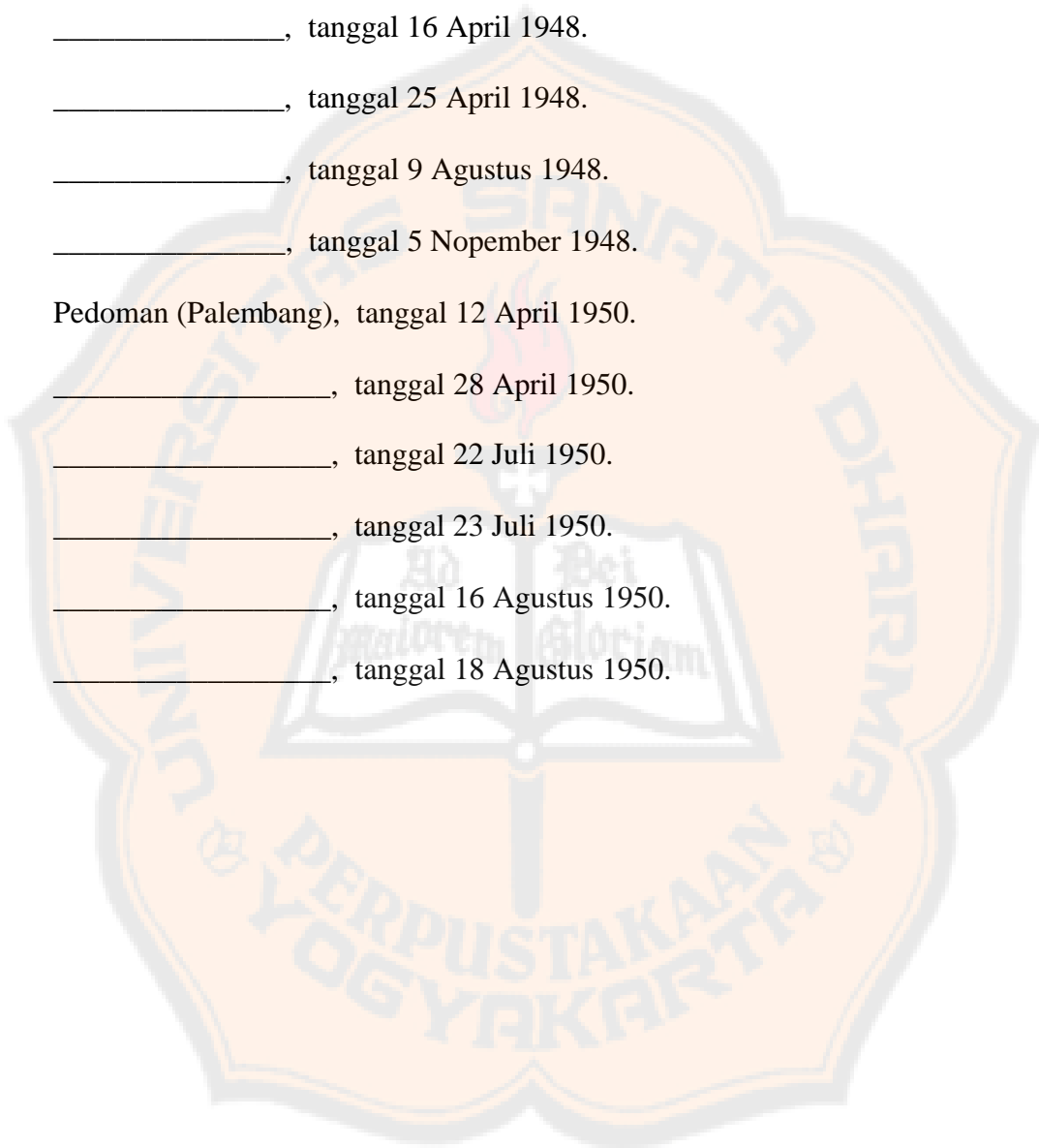
_____, tanggal 28 April 1950.

_____, tanggal 22 Juli 1950.

_____, tanggal 23 Juli 1950.

_____, tanggal 16 Agustus 1950.

_____, tanggal 18 Agustus 1950.



GLOSARRY

- a. APRA = Angkatan Perang Ratu Adil
- b. APRIS = Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
- c. AS = Amerika Serikat
- d. BFO = Bijeenkomst voor Overleg (Badan Permusyawaratan Federal)
- e. DK-PBB = Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- f. DPR-RIS = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
- g. FDR = Front Demokrasi Rakyat
- h. KMB = Konferensi Meja Bundar
- i. KNIL = Koninklijk Nederlands Indisch Leger
- j. KNIP = Komite Nasional Indonesia Pusat
- k. KTN = Komisi Tiga Negara
- l. MBKD = Markas Besar Komando Djawa
- m. NIT = Negara Indonesia Timur
- n. NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia
- o. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
- p. PDRI = Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
- q. PKI = Partai Komunis Indonesia
- r. PNI = Partai Nasional Indonesia
- s. RI = Republik Indonesia
- t. RIS = Republik Indonesia Serikat
- u. RMS = Republik Maluku Selatan
- v. UNCI = United Nations Commission for Indonesia
- w. UUD'45 = Undang-Undang Dasar tahun 1945

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



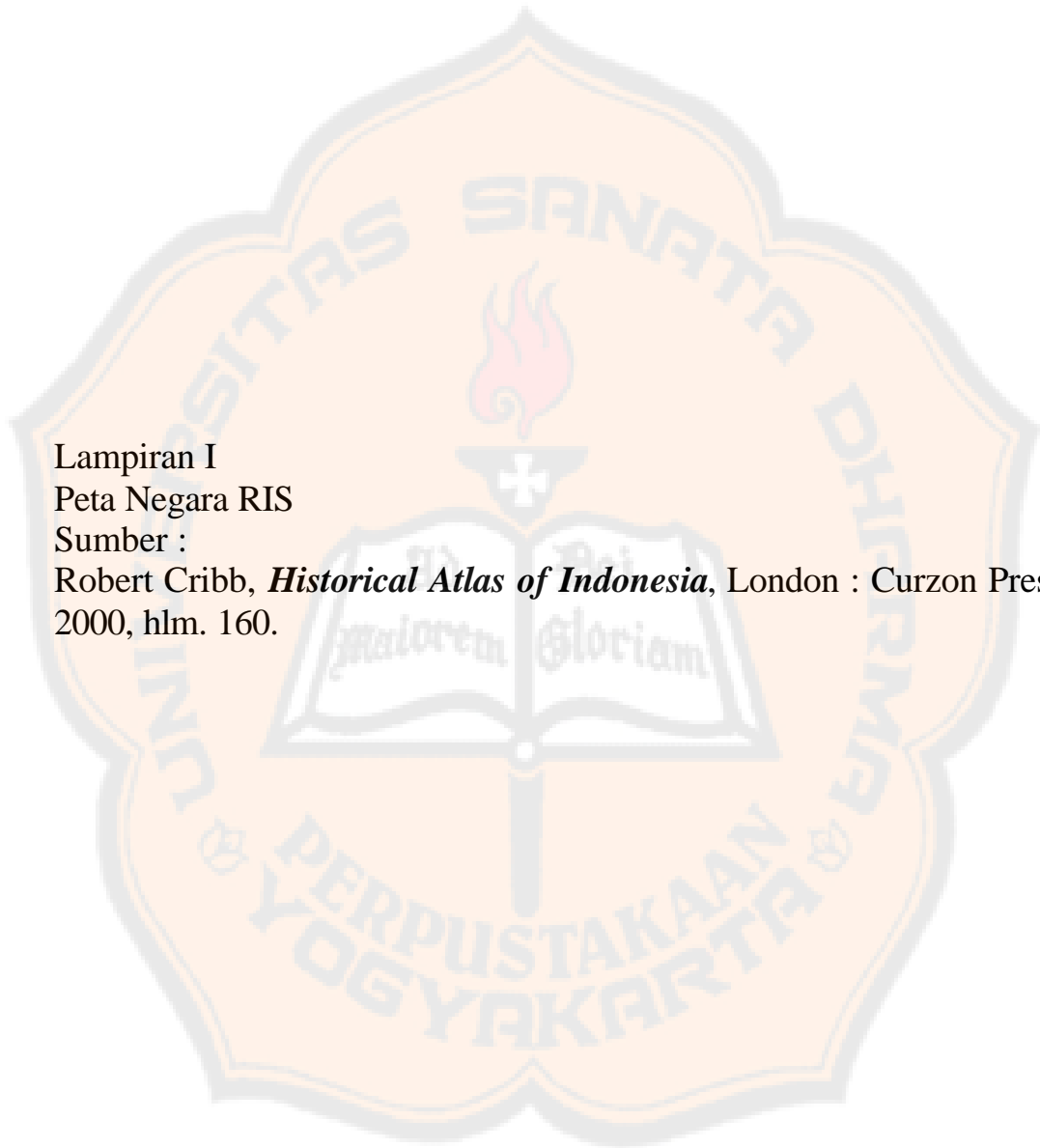
LAMPIRAN

Lampiran I

Peta Negara RIS

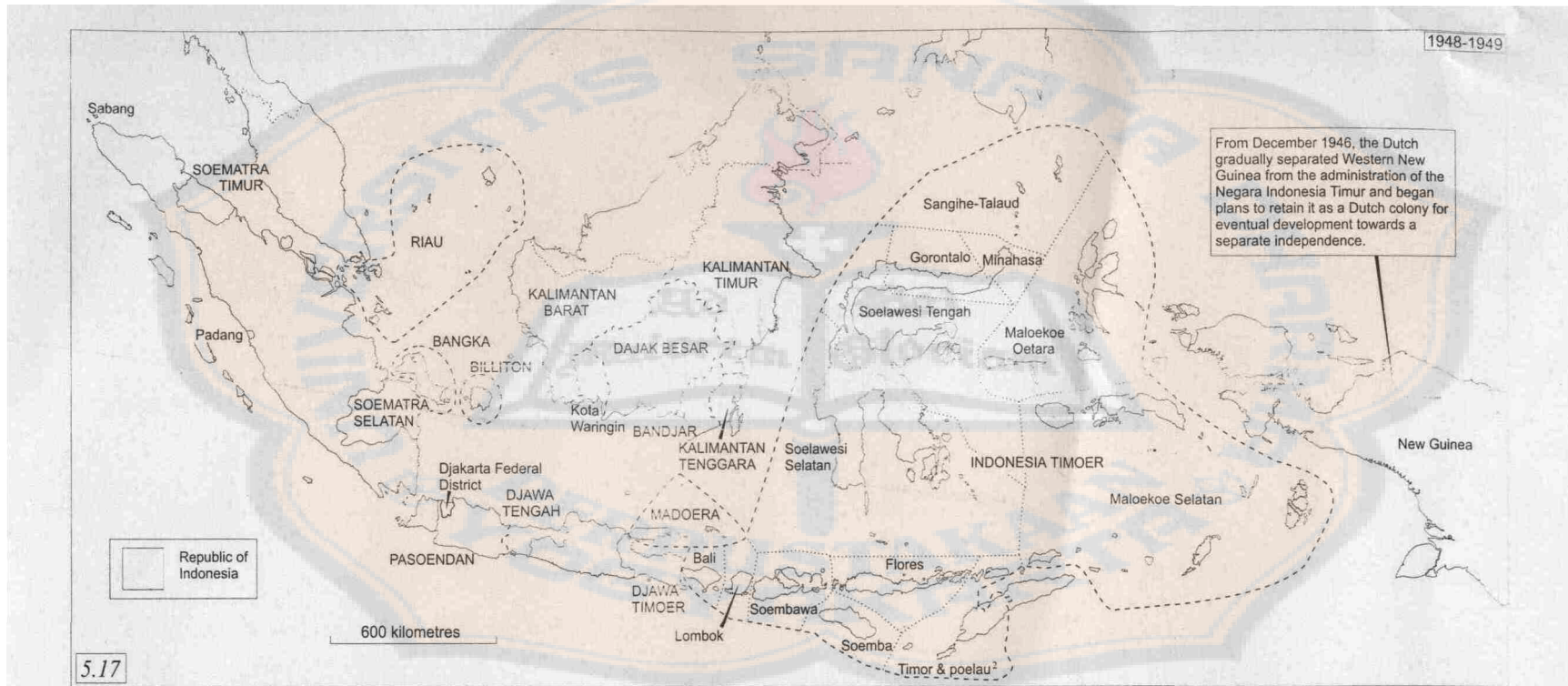
Sumber :

Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia*, London : Curzon Press,
2000, hlm. 160.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PETA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT



5.17 Federal Indonesia, 1948-1949.

Lampiran II

Pernyataan Pengakuan Kedaulatan antara RI dan Belanda

Sumber :

Tobing, K.M.L., *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia K.M.B.*,

Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987, hlm. 236-238.

**“AKTA PENYERAHAN DAN PENGAKUAN
KEDAULATAN”**

“ Kami, Juliana, dengan anugerah Tuhan, Ratu Negeri Belanda, Prinses van Oranye-Nassau, dan seterusnya.....

Pada hari ini, tanggal dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, dalam sebuah upacara yang dilangsungkan di Istana Kerajaan di Amsterdam ;

Berdasarkan :

Pasal 211 Undang-Undang Dasar dan seterusnya.....

Menetapkan :

Dengan demikian, hari ini tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Induk Persetujuan dengan Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan yang terlampir, dinyatakan sah menurut hukum ;

Dengan demikian pada hari ini juga Uni Belanda-Indonesia, dengan kami sebagai kepala dan jikalau terjadi pergantian, pengganti kami sebagai pewaris Mahkota Kerajaan Negeri Belanda, antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia Serikat, dinyatakan sudah berlaku ;

Selanjutnya semua ketentuan yang sudah disetujui, yang tercakup dalam Persetujuan Induk bab V dinyatakan berlaku ;

Memerintahkan :

Membuat empat lembar dari akta ini, dua lembar dalam bahasa Belanda dan dua lembar dalam bahasa Indonesia untuk kami tandatangani bersama semua menteri

dalam kabinet ; membuat terjemahan dalam bahasa Inggris ; satu lembar bahasa Belanda dan satu lembar bahasa Indonesia dan satu lembar terjemahannya dalam bahasa Inggris disimpan kabinet dan satu lembar bahasa Belanda dan satu lembar bahasa Indonesia dengan satu lembar terjemahan diserahkan kepada delegasi yang diutus Presiden Republik Indonesia Serikat menerima penyerahan kedaulatan, untuk disampaikan kepada Presiden tersebut ; supaya departemen kehakiman membuat tembusan-tembusan dari akta bahasa Belanda dan bahasa Indonesia ; setelah disahkan dan ditandai, dikirimkan kepada Staten Generaal (Sidang gabungan Perwakilan Rakyat dengan Senat) dan Dewan Pertimbangan Negara, gubernur wilayah Suriname dan gubernur Kepulauan Antillen, masing-masing satu lembar bahasa Indonesia dan satu lembar bahasa Indonesia.

Dibuat di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

Juliana

Perdana Menteri.

Menteri Urusan Umum,

W. Drees

Menteri Negara,

J.R.H. van Schaik

Menteri Daerah Seberang,

J.H. van Maarseveen

Menteri Negara,

Gotzen

Menteri Luar Negeri,

Stikker

Menteri Kehakiman,

Wijers

Menteri Dalam Negeri,

Teulings

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Th. Rutten

Menteri Keuangan,

P. Liefstinck

Menteri Peperangan,

Schokking

Menteri Marine,

Schokking

Menteri Pembangunan dan Urusan Perumahan,

J. in 't Veld

Menteri Pekerjaan Umum,

G.G.W. Spitzen

Menteri Perekonomian,

Van den Brink

Menteri Pertanian, Perikanan dan Bahan Makanan,

Mansholt

Menteri Sosial,

A.M. joekes

Drs. Mohammad Hatta, ketua delegasi Republik Indonesia Serikat bersama anggota-anggota delegasi, Dr. Mr. Supomo, Sultan Hamid, Dr. Suparmo, Dr. Mr. Kusumah Atmadja, Dr. Sukiman WiryoSanjoyo, Mr. Suyono Hadinoto, menyatakan atas nama Republik Indonesia Serikat telah menerima penyerahan kedaulatan sesuai dengan Akta Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan tersebut di atas dan menyatakan sepakat dengan pengesahan berdirinya Uni antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia Serikat dan hal-hal lain yang disebut dalam akta ini.

Mohammad Hatta

Supomo

Hamid II

Suparmo

Kusumah Atmadja

Sukiman WiryoSanjoyo

Suyono Hadinoto¹

Lampiran III

Pernyataan Pembubaran Negara RIS

Sumber :

Supomo, R., *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*,
Jakarta : Noordhoffkolff N.V., 1954, hlm. 166.

¹ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya dengan pertimbangan hasil foto kopi mengalami kerusakan.

**PIAGAM
PERNJATAAN TERBENTUKNYA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini kami memberitahukan kepada rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, bahwa rencana undang-undang untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan para pemerintah Negara-negara Bagian Republik Indonesia Serikat, telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, dalam rapat-rapatnja pada tanggal 14 Agustus 1950.

Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950, naskah Undang-Undang tersebut telah kami tanda-tangani dan ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri dan Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman berdasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Maka kami atas rakjat pada tingkatan perjuangan kemerdekaan sekarang ini, menjatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentuknya Negara Kesatuan Republik yang meliputi seluruh tanah air dan segenap Bangsa Indonesia.²

Djakarta, 15 Agustus 1950

SOEKARNO

² Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya dengan pertimbangan hasil foto kopi mengalami kerusakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SUPLEMEN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS

Nama Sekolah : SMA Negeri 7 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas : XII SOS
 Semester : 1
 Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perjalanan Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu (menit)	Penilaian			
					Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan	Sumber Bahan
Kemampuan menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan, politik dan konflik Indonesia-Belanda pada masa awal kemerdekaan	Mendeskripsikan proses pengembalian pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta	1. Peristiwa yang melatarbelakangi pengasingan pemimpin Republik Indonesia 2. Latar belakang pengembalian pemimpin Republik Indonesia	Mendeskripsikan proses pengembalian pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta	1 X 45	Tugas individu	Uraian	1. Deskripsi peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi pengasingan pemimpin Republik Indonesia! 2. Jelaskan latar	Buku Sejarah terbitan PN Balai Pustaka, PN Erlangga, PN Grasindo Buku-buku referensi tentang KMB (Konferensi Meja

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		ke Yogyakarta					belakang	Bundar)
		3. Proses pengembalian pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta					pengembangan pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta!	
							3. Bagaimana proses pengembangan pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta?	
	Mendeskripsikan jalannya KMB (Konferensi	1. Jalannya KMB (Konferensi Meja	Mendiskripsikan jalannya KMB (Konferensi	1 X 45	Tugas kelompok	Uraian	Diskusikan secara berkelompok mengenai jalannya	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>Mengidentifikasi dampak politik dan militer terhadap RIS serta pembubaran RIS</p>	<p>Meja Bundar) dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat)</p>	<p>2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KMB (Konferensi Meja Bundar)</p> <p>3. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat)</p>	<p>Meja Bundar) dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat)</p>	<p>1X45</p>	<p>Tugas Kelompok</p>	<p>Uraian</p>	<p>KMB (Konferensi Meja Bundar), hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat)</p> <p>Diskusikan mengenai dampak politik dan militer terhadap RIS (Republik Indonesia</p>	
--	---	--	---	-------------	-----------------------	---------------	---	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Memahami dan mengaplikasikan sikap rela berkorban</p>	<p>APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)</p> <p>b) Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)</p> <p>c) Pemberontakan Andi Aziz</p> <p>d) Kompromi politik antara negara bagian</p> <p>2. Pembubaran Negara RIS (Republik Indonesia Serikat)</p> <p>a) Definisi sikap rela berkorban</p>	<p>Menjelaskan arti sikap rela berkorban dan keuletan serta mengaplikasika</p>	<p>1X45</p>	<p>Tugas kelompok dan individu</p>	<p>Uraian dan praktek</p>	<p>Serikat) serta pembubaran RIS (Republik Indonesia Serikat)</p> <p>Diskusikan arti sikap rela berkorban dan sifat ulet serta</p>	
--	--	--	--	-------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	untuk bangsa dan negara serta menanamkan sifat ulet dalam perjuangan	b) Bentuk-bentuk sikap rela berkorban c) Definisi sifat ulet d) Manfaat sifat ulet	n sikap rela brkorban dan sifat ulet dalam kehidupan				bentuk-bentuk sikap rela berkorban dan sifat ulet tersebut dalam kehidupan sehari-hari	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, 09 Agustus 2007
Guru Bidang Studi

Leonardo